

LAPORAN
PENELITIAN INTERNAL KELOMPOK MONODISIPLIN



JUDUL

**TELAAH FUNGSI DAN KONTROL MEDIA KOMUNITAS TERHADAP
PEMBANGUNAN DI TENGAH ARUS MEDIA BARU: STUDI PADA MEDIA
KOMUNITAS SPEAKER KAMPUNG (LOMBOK TIMUR, NUSA TENGGARA
BARAT) & PENDOWO FM (SIDOARJO, JAWA TIMUR)**

TEMA PENELITIAN UNIVERSITAS
Kearifan Lokal

TOPIK PENELITIAN UNIT
Lokalitas

Ketua

Drs. Mario Antonius Birowo, M.A., Ph.D.
(NPP: 11105100516869/NIDN: 0003046703)

Anggota

Ranggabumi Nuswantoro, S.Sos., M.A.
(NPP: 10.14.886./NIDN: 0506028401)

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Komunikasi

Oktober 2017

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN INTERNAL KELOMPOK MONODISIPLIN	
1	Judul Proposal Penelitian TELAAH FUNGSI DAN KONTROL MEDIA KOMUNITAS TERHADAP PEMBANGUNAN DI TENGAH ARUS MEDIA BARU: STUDI PADA MEDIA KOMUNITAS SPEAKER KAMPUNG (LOMBOK TIMUR, NUSA TENGGARA BARAT) & PENDOWO FM (SIDOARJO, JAWA TIMUR)
2	Kategori Penelitian Penelitian dilanjutkan dengan publikasi jurnal ilmiah terakreditasi (A)
3	Tema Penelitian Universitas Kearifan Lokal
4	Topik Penelitian Unit Lokalitas
5	Bebas SKS Penelitian (5) SKS Berlaku semester Genap 2016/2017
IDENTITAS PENELITIAN	
6	Nama Ketua Penelitian Drs. Mario Antonius Birowo, M.A., Ph.D.
	Jabatan/Golongan Lektor Kepala/IV A
	NPP/NIDN NPP: 11105100516869/NIDN: 0003046703
	Bidang Keahlian Ilmu Komunikasi
	Unit/Fakultas/Jurusan Unit Jurusan/Program Studi Fakultas ISIP Ilmu Komunikasi
	Alamat Rumah Karangwaru Lor TR II/228A RT 56 RW 02 Yogyakarta 55241
	No. Telp./Faks./Email Ketua 087839034850 Email: mbirowo@yahoo.com
7	Anggota Kelompok Anggota-2
	Nama Anggota Pengabdian Rangabuni Nuswantoro, S. Sos, MA
	Pangkat/Golongan Asisten Ahli / IIIA
	NPP/NIDN 10.14.886 / 0506028401
	Bidang Keahlian Ilmu Komunikasi
	Unit/Fakultas/Jurusan Ilmu Komunikasi / FISIP
8	Lokasi Penelitian Kabupaten Lombok Timur NTB & Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur
9	Waktu Penelitian Januari-Maret 2017
10	Dana yang diusulkan Dana UAJY
	Rp. 20.000.000,-
	Jumlah Total Rp. 20.000.000,-
	Terbilang Dua puluh juta rupiah
11	Spesifikasi outcome Publikasi ilmiah

Mengetahui dan Menyetujui
Pimpinan Unit

Dr. MC. Nialk SH Rejeki, M.Si
NPP: 07.92.401 / NIDN: 0504106301

Yogyakarta, 9 Oktober 2017

Pengusut

Dr. Mario Antonius Birowo, M.A., Ph.D.
NPP: 11105100516869/NIDN: 0003046703

Mengetahui dan Menyetujui
Ketua LPPM

Dr. J Purni Susjariha Saniaya, SE.
M.Si., Ak., CA.
NPP: 12.94.528/NIDN: 0524107001



PRAKATA

Isu utama yang diangkat dalam penelitian ini ialah peran media komunitas dalam pengawasan pembangunan. Media komunitas yang dimaksudkan di sini bukan sekadar media sebagai medium komunikasi, namun juga media yang menjadi ruang berekspresi bagi warga komunitas. Adapun pembangunan yang disorot dalam penelitian ini ialah pembangunan yang berkeadilan, yakni mensyaratkan adanya partisipasi dan keterlibatan warga di dalamnya, terutama dalam pengambilan keputusan soal apa dan bagaimana pembangunan itu dilakukan. Warga berhak tahu arah dan tujuan pembangunan, bagaimana prosesnya, siapa saja yang terlibat, berapa anggaran yang dibutuhkan, termasuk transparansi penggunaan anggarannya (Nuswantoro, 2016). Penelitian ini berhasil memotret bagaimana media komunitas berperan di dalam pembangunan di daerah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga eksekusi. Seperti ditunjukkan oleh Pendowo FM yang aktif bekerja sama dengan Badan/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM) Kecamatan Balongbendo untuk menggulirkan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

Program KOTAKU merupakan salah satu upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU-PR) dalam percepatan penanganan permukiman kumuh dan mendukung “Gerakan 100-0-100”, yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak¹. KOTAKU dilaksanakan di 34 provinsi, yang tersebar di 269 kabupaten/kota, pada 11.067 desa/kelurahan, termasuk salah satunya Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo.

Penelitian ini dilakukan di dua media komunitas yakni Speaker Kampung (Lombok Timur) dan Pendowo FM (Sidoarjo), serta berlangsung selama 1-2 minggu di akhir bulan Januari 2017 dan berhasil menghasilkan temuan penting: 1) media komunitas menjadi representasi warga di dalam menyalurkan kepentingannya terkait jalannya pembangunan di daerah (dalam hal ini di tingkat desa/kecamatan setempat), 2) media komunitas mengembangkan medium penyampaian pesannya, tidak hanya melalui media primer yakni radio tetapi mulai merambah media-media berbasis internet termasuk salah satunya Sistem Informasi Desa (SID), 3) media komunitas menjadi ruang bagi warga untuk menjalin relasi dengan pemerintah daerah, dalam semangat egalitarianisme mereka beraktivitas bersama untuk kemajuan daerahnya, 4) media komunitas aktif membangun jaringan dengan elemen

¹ <http://www.p2kp.org/aboutdetil.asp?mid=1&catid=5&>

masyarakat sipil lainnya untuk mengontrol jalannya pembangunan, termasuk pers, kampus, dan organisasi non-pemerintah lainnya.

Penelitian ini juga berhasil menemukan relasi positif antara aktivitas kemasyarakatan yang digawangi oleh radio komunitas dengan Sistem Informasi Desa (SID). SID merupakan terobosan yang digagas oleh organisasi non-pemerintah sebagai sebuah aplikasi yang membantu pemerintahan desa dalam mendokumentasikan data-data milik desa guna memudahkan proses pencariannya. Sedangkan dalam arti luas, SID diartikan sebagai suatu rangkaian/sistem (baik mekanisme, prosedur hingga pemanfaatan) yang bertujuan untuk mengelola sumber daya yang ada di komunitas (Jahja dkk., 2012). Pada subyek penelitian Pendowo FM misalnya, SID Desa Balongbendo menjadi sarana untuk memantau pergerakan pembangunan setempat. mulai dari aspek administratif (jumlah penduduk miskin, jumlah anak putus sekolah, dan sebagainya), sampai aspek perencanaan yang berkaitan dengan anggaran desa/dana desa.

Dalam laporan ini dipaparkan bagaimana media komunitas memfasilitasi warga terlibat dalam pembangunan di daerahnya. Bagaimana masing-masing peran nantinya dijelaskan dengan detail, baik sisi aparat maupun warga. Dalam tataran ideal aparat sebagai pihak eksekutif yang menjalankan roda pembangunan perlu pro-aktif melibatkan warga dalam pengambilan keputusan, selain itu aparat perlu menjalankan pembangunan dengan prinsip-prinsip demokrasi yakni keterbukaan, partisipasi, serta ada mekanisme *check-balances*. Bagi warga keseriusan ditunjukkan dengan dimunculkannya ruang untuk menyampaikan pemikiran, aspirasi, pendapat seputar pembangunan yang tengah berlangsung. Ruang yang dimaksud di beberapa daerah diwujudkan dengan menggagas media komunitas. Media komunitas sebagai media warga diisi oleh orang-orang yang 'bekerja' untuk komunitas, yang biasanya disebut sebagai jurnalis warga. Aktivitas jurnalis warga biasanya bersifat voluntaristik. Mereka akan menuliskan berita yang mereka lihat, yang bermanfaat bagi komunitasnya. Satu hal menarik yang juga menjadi temuan penelitian adalah: tiap media komunitas yang eksis selalu memiliki pemimpin yang sejak awal konsisten mengawal jalannya media komunitas. Dalam konteks Speaker Kampung pemimpinnya Hajad Guna Roasmadi (Eros), sedangkan Pendowo FM pemimpinnya Widodo.

Laporan ini lebih lanjut akan memberikan paparan komprehensif mengenai fungsi dan peran media komunitas dalam mengontrol jalannya pembangunan di daerah. Setidaknya terdapat 4 temuan utama yakni: 1) media komunitas menjadi representasi warga di dalam menyalurkan kepentingannya terkait jalannya pembangunan di daerah (dalam hal ini di tingkat desa/kecamatan setempat), 2) media komunitas mengembangkan medium penyampaian

pesannya, tidak hanya melalui media primer yakni radio tetapi mulai merambah media-media berbasis internet termasuk salah satunya Sistem Informasi Desa (SID), 3) media komunitas menjadi ruang bagi warga untuk menjalin relasi dengan pemerintah daerah, dalam semangat egalitarianisme mereka beraktivitas bersama untuk kemajuan daerahnya, 4) media komunitas aktif membangun jaringan dengan elemen masyarakat sipil lainnya untuk mengontrol jalannya pembangunan, termasuk pers, kampus, dan organisasi non-pemerintah lainnya.

Oleh karena itu tidak berlebihan jika lewat hasil penelitian ini dimunculkan pemikiran bahwa media komunitas mampu menghadirkan informasi yang berimbang bagi warga. Dalam kaitannya dengan pembangunan, media komunitas menjadi saluran warga untuk menyampaikan ide, gagasan, dan pendapat seputar pembangunan. Bahkan juga kritik terhadap pembangunan. Namun perlu digarisbawahi bahwa informasi yang ditampilkan di media komunitas merupakan informasi yang sifatnya lokal dan tidak terpusat (non-sentralistik). Hal yang diinformasikan hanya seputar yang terjadi di sekitar warga, apakah itu desa atau komunitas. Oleh karena itu konsumsinya bersifat terbatas. Walau demikian hal ini justru menjadi kekhasan media komunitas, yakni menyajikan berita atau informasi yang selama ini tidak tersentuh, bahkan tidak terpikirkan, oleh media arus utama. Media komunitas hadir dengan nama, karakter, visi dan misi yang berbeda, namun memiliki esensi yang sama yakni, memperkaya khasanah informasi yang bersifat lokal. Lewat informasi-informasi inilah warga mengontrol jalannya pembangunan.

RINGKASAN

Pembangunan yang berkeadilan mensyaratkan partisipasi dan keterlibatan warga di dalamnya, terutama dalam pengambilan keputusan soal apa dan bagaimana pembangunan itu dilakukan. Warga berhak tahu arah dan tujuan pembangunan, bagaimana prosesnya, siapa saja yang terlibat, berapa anggaran yang dibutuhkan, termasuk transparansi penggunaan anggarannya. Penelitian ini melihat kondisi awal yang menarik, yakni soal apa dan bagaimana warga terlibat di dalam pembangunan, terutama di dua media komunitas yakni *Speaker Kampung & Pendowo FM*. *Speaker Kampung* dan *Pendowo FM* merupakan dua diantara sekian banyak media komunitas yang ada di Indonesia. *Speaker Kampung* beralamat di Jalan Wisata Lemor, Dusun Montong gedeng, Desa Ketangga, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok timur, NTB, sementara *Pendowo FM* di Jl Gajah Mada 336 RT 10/RW 04, Dusun Semawut, Desa Balongbendo, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Keduanya memiliki persamaan yakni mengkombinasikan aktivitas *online-offline* serta *onair-offair*. Artinya pengawasan pembangunan yang dilakukan oleh media komunitas dilakukan lewat aktivitas yang secara langsung difasilitasi oleh media komunikasi, dalam hal ini radio untuk *Pendowo FM* dan website/media sosial untuk *Speaker Kampung*.

Penelitian yang dilakukan di dua media komunitas yakni *Speaker Kampung* (Lombok Timur) dan *Pendowo FM* (Sidoarjo) bertujuan mengetahui fungsi dan peran media komunitas dalam memberikan kontrol pembangunan daerah. Penelitian yang berlangsung selama 1-2 minggu di akhir bulan Januari 2017 telah menghasilkan temuan penting: 1) media komunitas menjadi representasi warga di dalam menyalurkan kepentingannya terkait jalannya pembangunan di daerah (dalam hal ini di tingkat desa/kecamatan setempat), 2) media komunitas mengembangkan medium penyampaian pesannya, tidak hanya melalui media primer yakni radio tetapi mulai merambah media-media berbasis internet termasuk salah satunya Sistem Informasi Desa (SID), 3) media komunitas menjadi ruang bagi warga untuk menjalin relasi dengan pemerintah daerah, dalam semangat egalitarianisme mereka beraktivitas bersama untuk kemajuan daerahnya, 4) media komunitas aktif membangun jaringan dengan elemen masyarakat sipil lainnya untuk mengontrol jalannya pembangunan, termasuk pers, kampus, dan organisasi non-pemerintah lainnya.

DAFTAR ISI

1. Daftar Isi
2. Bab I-Pendahuluan
3. Bab II-Tinjauan Pustaka
4. Bab III-Tujuan dan Manfaat Penelitian
5. Bab IV-Metode Penelitian
6. Bab V-Hasil dan Pembahasan
7. Bab VI-Kesimpulan dan Saran
8. Bab VII-Pengelolaan Outcome
9. Daftar Pustaka



BAB I. PENDAHULUAN

Penelitian yang dilakukan di dua media komunitas yakni Speaker Kampung (Lombok Timur) dan Pendowo FM (Sidoarjo) bertujuan mengetahui fungsi dan peran media komunitas dalam memberikan kontrol pembangunan daerah. Penelitian yang berlangsung selama 1-2 minggu di akhir bulan Januari 2017 telah menghasilkan temuan penting: 1) media komunitas menjadi representasi warga di dalam menyalurkan kepentingannya terkait jalannya pembangunan di daerah (dalam hal ini di tingkat desa/kecamatan setempat), 2) media komunitas mengembangkan medium penyampaian pesannya, tidak hanya melalui media primer yakni radio tetapi mulai merambah media-media berbasis internet termasuk salah satunya Sistem Informasi Desa (SID), 3) media komunitas menjadi ruang bagi warga untuk menjalin relasi dengan pemerintah daerah, dalam semangat egalitarianisme mereka beraktivitas bersama untuk kemajuan daerahnya, 4) media komunitas aktif membangun jaringan dengan elemen masyarakat sipil lainnya untuk mengontrol jalannya pembangunan, termasuk pers, kampus, dan organisasi non-pemerintah lainnya.

Adapun pembangunan yang disorot dalam penelitian ini ialah pembangunan yang berkeadilan, yakni mensyaratkan adanya partisipasi dan keterlibatan warga di dalamnya, terutama dalam pengambilan keputusan soal apa dan bagaimana pembangunan itu dilakukan. Warga berhak tahu arah dan tujuan pembangunan, bagaimana prosesnya, siapa saja yang terlibat, berapa anggaran yang dibutuhkan, termasuk transparansi penggunaan anggarannya (Nuswantoro, 2016). Penelitian ini berhasil memotret bagaimana media komunitas berperan di dalam pembangunan di daerah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga eksekusi. Seperti ditunjukkan oleh Pendowo FM yang aktif bekerja sama dengan Badan/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM) Kecamatan Balongbendo untuk menggulirkan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

Program KOTAKU merupakan salah satu upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU-PR) dalam percepatan penanganan permukiman kumuh dan mendukung “Gerakan 100-0-100”, yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak². KOTAKU dilaksanakan di 34 provinsi, yang tersebar di 269 kabupaten/kota, pada 11.067 desa/kelurahan, termasuk salah satunya Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo.

² <http://www.p2kp.org/aboutdetil.asp?mid=1&catid=5&>

Penelitian ini juga berhasil menemukan relasi positif antara aktivitas kemasyarakatan yang digawangi oleh radio komunitas dengan Sistem Informasi Desa (SID). SID merupakan terobosan yang digagas oleh organisasi non-pemerintah sebagai sebuah aplikasi yang membantu pemerintahan desa dalam mendokumentasikan data-data milik desa guna memudahkan proses pencariannya. Sedangkan dalam arti luas, SID diartikan sebagai suatu rangkaian/sistem (baik mekanisme, prosedur hingga pemanfaatan) yang bertujuan untuk mengelola sumber daya yang ada di komunitas (Jahja dkk., 2012). Pada subyek penelitian Pendowo FM misalnya, SID Desa Balongbendo menjadi sarana untuk memantau pergerakan pembangunan setempat. mulai dari aspek administratif (jumlah penduduk miskin, jumlah anak putus sekolah, dan sebagainya), sampai aspek perencanaan yang berkaitan dengan anggaran desa/dana desa.

Dalam laporan ini dipaparkan bagaimana media komunitas memfasilitasi warga terlibat dalam pembangunan di daerahnya. Bagaimana masing-masing peran nantinya dijelaskan dengan detail, baik sisi aparat maupun warga. Dalam tataran ideal aparat sebagai pihak eksekutif yang menjalankan roda pembangunan perlu pro-aktif melibatkan warga dalam pengambilan keputusan, selain itu aparat perlu menjalankan pembangunan dengan prinsip-prinsip demokrasi yakni keterbukaan, partisipasi, serta ada mekanisme *check-balances*. Bagi warga keseriusan ditunjukkan dengan dimunculkannya ruang untuk menyampaikan pemikiran, aspirasi, pendapat seputar pembangunan yang tengah berlangsung. Ruang yang dimaksud di beberapa daerah diwujudkan dengan menggagas media komunitas. Media komunitas sebagai media warga diisi oleh orang-orang yang 'bekerja' untuk komunitas, yang biasanya disebut sebagai jurnalis warga. Aktivitas jurnalis warga biasanya bersifat voluntaristik. Mereka akan menuliskan berita yang mereka lihat, yang bermanfaat bagi komunitasnya. Satu hal menarik yang juga menjadi temuan penelitian adalah: tiap media komunitas yang eksis selalu memiliki pemimpin yang sejak awal konsisten mengawal jalannya media komunitas. Dalam konteks Speaker Kampung pemimpinnya Hajad Guna Roasmadi (Eros), sedangkan Pendowo FM pemimpinnya Widodo.

Media komunitas menghadirkan informasi yang berimbang bagi warga. Dalam kaitannya dengan pembangunan, media komunitas menjadi saluran warga untuk menyampaikan ide, gagasan, dan pendapat seputar pembangunan. Bahkan juga kritik terhadap pembangunan. Namun perlu digarisbawahi bahwa informasi yang ditampilkan di media komunitas merupakan informasi yang sifatnya lokal dan tidak terpusat (non-sentralistik). Hal yang diinformasikan hanya seputar yang terjadi di sekitar warga, apakah itu desa atau komunitas. Oleh karena itu konsumsi informasinya bersifat terbatas. Walau demikian hal ini

justru menjadi kekhasan media komunitas, yakni menyajikan berita atau informasi yang selama ini tidak tersentuh, bahkan tidak terpikirkan, oleh media arus utama. Media komunitas hadir dengan nama, karakter, visi dan misi yang berbeda, namun memiliki esensi yang sama yakni, memperkaya khasanah informasi yang bersifat lokal. Lewat informasi-informasi inilah warga mengontrol jalannya pembangunan.

Laporan ini lebih lanjut akan memberikan paparan komprehensif mengenai fungsi dan peran media komunitas dalam mengontrol jalannya pembangunan di daerah. Setidaknya terdapat 4 temuan utama yakni: 1) media komunitas menjadi representasi warga di dalam menyalurkan kepentingannya terkait jalannya pembangunan di daerah (dalam hal ini di tingkat desa/kecamatan setempat), 2) media komunitas mengembangkan medium penyampaian pesannya, tidak hanya melalui media primer yakni radio tetapi mulai merambah media-media berbasis internet termasuk salah satunya Sistem Informasi Desa (SID), 3) media komunitas menjadi ruang bagi warga untuk menjalin relasi dengan pemerintah daerah, dalam semangat egalitarianisme mereka beraktivitas bersama untuk kemajuan daerahnya, 4) media komunitas aktif membangun jaringan dengan elemen masyarakat sipil lainnya untuk mengontrol jalannya pembangunan, termasuk pers, kampus, dan organisasi non-pemerintah lainnya.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

II. 1. Media Komunitas & Pembangunan

Pustaka mengenai media komunitas bersifat cair dan tidak bernarasi tunggal. Walau demikian terdapat beberapa konsep media komunitas dari berbagai ahli yang bisa dijadikan rujukan, termasuk bagaimana posisi media komunitas terhadap pembangunan. Salah satunya dari Asosiasi penelitian media dan komunitas internasional (*International Association of Media and Communication Research* [IAMCR]). IAMCR memberi ciri bahwa media komunitas berasal, bersirkulasi dan beresonansi dalam masyarakat sipil, yakni ruang media komunikasi yang eksis di luar negara dan pasar (kerap kali independen dan nonprofit), meskipun tak menutup kemungkinan bagi media komunitas untuk berinteraksi dengan keduanya (IAMCR, dikutip dari Rennie 2006: 4).

Rennie juga mendefinisikan media komunitas dalam konteks masyarakat sipil. Media komunitas harus dilihat sebagai alat untuk mengelola maupun mengembangkan masyarakat sipil oleh masyarakat sipil itu sendiri. Masyarakat sipil adalah entitas yang terpisah dari negara, meskipun dalam banyak hal entitas ini perlu berhubungan dengan negara agar tetap eksis. Hubungan dengan negara ini pun berlaku bagi media komunitas, yang sekaligus membedakan posisi media komunitas dengan jenis media lain, misalnya *zine* maupun bentuk media lain yang bisa eksis tanpa perlu mengkhawatirkan regulasi media (oleh negara).

Penegasan posisi media komunitas dengan negara juga ditunjukkan dari konsep yang dikemukakan oleh Combine Resources Institution (CRI). CRI sendiri selama ini tidak memiliki definisi ketat dalam menyebut komunitas. Dalam konsep CRI, media komunitas bisa muncul dalam ruang geografis tertentu (misalnya desa, dusun, kampung, dsb.) maupun di komunitas yang memiliki kesamaan kepentingan. Secara implisit, CRI selama ini mendorong perkembangan media komunitas bagi warga negara yang termarjinalkan, utamanya oleh kebijakan negara. Oleh karena itu, CRI mengamini bahwa media komunitas adalah media perlu ada sebagai ruang yang steril dari *negara* dan *pasar*, meskipun dalam ruang itu media komunitas tetap bisa berhubungan dengan keduanya.

Walaupun terkesan berjarak dengan negara namun sejatinya media komunitas menjadi bagian dari negara itu sendiri. Sebab anggota media komunitas merupakan warga negara yang tinggal dan hidup di wilayahnya, termasuk memberikan sumbangan pemikiran maupun kritik terhadap proses pembangunan. Mengenai relasi antara media komunitas dengan pembangunan, terdapat konsep yang dikemukakan oleh Pawito sebagai berikut: media

komunitas (*community media*) merupakan jenis media (cetak maupun elektronik) yang hadir di dalam lingkungan masyarakat atau komunitas tertentu dan dikelola oleh dan diperuntukkan bagi warga komunitas tertentu. Karakter utama dari media komunitas dengan demikian adalah (a) memiliki jangkauan terbatas (lokal), (b) menampilkan isi yang bersifat kontekstual mengacu kondisi komunitas, (c) pengelola serta target adalah orang-orang dari komunitas yang sama, dan (d) hadir dengan misi melayani - tidak ada orientasi mencari keuntungan modal (Pawito, 2007). Dari pengertian tersebut bisa ditekankan bahwa lokalitas menjadi ciri utama dari media komunitas. Lokalitas tersebut terwujud dalam segala aspek yang muncul dari media komunitas, mulai dari *content*, redaksional, hingga operasional. Sifatnya yang nonprofit membuat media komunitas lebih leluasa bergerak melayani kepentingan warga, tanpa risau diintervensi oleh kepentingan pemodal.

Dalam konteks pembangunan daerah, berkenaan apa media komunitas terutama memiliki signifikansi, maka upaya pemberdayaan dan aktualisasi potensi-potensi lokal menjadi hal yang sangat utama. Pembangunan daerah dengan demikian tidak harus diartikan sebagai kemandirian masyarakat suatu daerah (atau para warga suatu komunitas) – dalam arti tidak memiliki ketergantungan dengan daerah lain (atau dengan para warga komunitas lain) tetapi yang lebih penting adalah apresiasi dan optimalisasi pemanfaatan potensi dan produk-produk lokal (daerah) demi lebih tercukupinya kebutuhan warga daerah. Pembangunan daerah dengan demikian diharapkan dapat memperkokoh nilai-nilai budaya lokal (daerah) yang selanjutnya juga dapat memperkokoh nilai-nilai dan identitas budaya bangsa (Pawito, 2007).

II. 2. Media Baru

Terdapat banyak teori, konsep, dan pemikiran mengenai media baru. Menurut Leah A. Lievrouw & Sonia Livingstone (2011: 7) definisi media baru adalah sebagai berikut:

“To begin with, we define new media as information and communication technologies and their social contexts, which include three main components: (1) the material artifacts or devices that enable and extend people’s abilities to communicate and share meaning; (2) the communication activities or practice that people engage in as they develop and use those devices; and (3) the larger social arrangements organizational forms that people create and build around artifacts and practices.”

Dalam pemikiran Lievrouw & Livingstone, kekhasan media baru nampak dalam tiga hal yakni soal materi, praktek komunikasi, dan pengorganisasian sosial. Dimulai dari materi baru lalu muncullah ruang baru yang membuat proses berinteraksi dan berkomunikasi jadi lebih mudah. Selanjutnya muncul pengorganisasian yang membuat proses tersebut menjadi

terstruktur dan sistemik. Selanjutnya muncullah organisasi, kelompok, atau grup berbasis media baru.

Ahli lain yakni Glen Creeber dan Royston Martin memiliki pendapat berbeda. Creeber dan Martin (2009: 2) merujuk pada ensiklopedi gratis berbasis internet, Wikipedia (yang merupakan produk dari media baru) mendefinisikan media baru sebagai produk teknologi komunikasi yang hadir bersama-sama dengan komputer digital. Sebelum tahun 1980-an media diandalkan terutama pada cetak dan model analog seperti koran, televisi, bioskop, dan radio. Sekarang dunia memiliki radio digital, televisi dan bioskop, sementara bahkan mesin cetak telah diubah oleh teknologi digital yang baru seperti perangkat lunak manipulasi gambar seperti Adobe Photoshop dan alat-alat *desktop publishing*. Beberapa teknologi yang masuk kategori media baru adalah Internet dan World Wide Web, televisi digital, film digital, *Personal Computer* (PC), DVD (Digital Versatile Disc atau Digital Video Disc), CD (Compact Disc), media portabel players (seperti MP3 Player), ponsel (atau cell) phones, video (atau komputer) game, *Virtual Reality* (VR), *Artificial Intelligence* (AI).

Dalam perspektif Creeber dan Martin media baru mungkin bukan istilah yang ideal untuk menyebut teknologi komunikasi baru. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa kebaruan menjadi unsur pokok dalam transformasi teknologi komunikasi tersebut. Terdapat beberapa perbedaan utama antara media analog dan media baru. *Pertama*, media baru melampaui teknologi analog dalam kemudahan dipindahtangankan satu satu platform ke platform media lainnya. Data dapat disimpan dan diakses dari jarak jauh dan didistribusikan. *Kedua*, data digital juga lebih mudah untuk dikreasi dan hasil akhirnya dapat direproduksi tanpa batas dan kehilangan kualitas di dalam media baru. Singkatnya, bahan digital melebihi sistem analog dalam hal kecepatan, kualitas, dan kinerja.

Media digital atau media baru tidak hanya memunculkan fisik teknologi informasi dan komunikasi yang baru, namun juga cara berpikir baru. Beberapa ahli menyebut kebaruan ini sebagai revolusi digital, kebaruan digital yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Creeber dan Martin memberi catatan bahwa revolusi digital adalah istilah yang baru-baru ini dipakai untuk menggambarkan efek dari penurunan biaya dan ekspansi dari perangkat digital seperti komputer dan telekomunikasi. Dengan kedatangan media digital, dunia ini bisa dibayangkan berubah begitu pula dengan cara kita berpikir tentang diri kita sendiri dan planet ini (memang alam semesta). Secara khusus, budaya digital dikaitkan dengan percepatan perubahan sosial.

II.3. Demokrasi Digital

Era digital ditandai dengan kemunculan internet. Teknologi digital berubah secara fundamental dari komputasi untuk komunikasi. Transformasi ini mencapai masa kritis di awal tahun 1990-an ketika internet menjadi sarana komunikasi yang dapat diandalkan di antara individu. Hal ini memungkinkan orang membuat konten yang lebih baik dan lebih kaya dengan menggabungkan kata-kata tertulis dengan suara dan video. Jika biasanya pesan dikonversi dalam bentuk tertulis, suara, atau audiovisual, maka internet memungkinkan orang merangkai pesan dari ketiga unsur yang ada. Sebagaimana dinyatakan oleh David Winston (2003):

“This gave people the ability to create better and richer content by combining the written word with voice and video. Additionally, content became data and could be searched for important bits of information. Suddenly, millions of documents were searchable instead of having to look up indexes in books or review video or audiotapes.”

Orang kini mencari data tidak lagi dalam bentuk indeks di buku, atau review kaset audio maupun video, melainkan dalam bentuk digital yang dengan mudah diketikkan di website pencari data seperti Google atau Yahoo.

Dalam kaitannya dengan politik dan demokrasi, menurut Winston setidaknya terdapat empat hal yang membedakan dunia digital dengan dunia lama (2003: 135-136):

Pertama, dalam hal ini *age of reason* baru. Komunikasi digital akan memberdayakan individu dengan mengorbankan elit, artinya proses penyampaian informasi politik lebih independen dan tidak tergantung kekuasaan elit (yang mungkin menguasai media).

Kedua, media komunikasi baru ini akan bergerak dengan kecepatan yang hampir tidak bisa dipahami. Tenggat waktu menjadi tidak relevan lagi atau dalam kenyataannya, tidak ada. Permintaan akan berita *real time* meningkat drastis. Media-media konvensional mulai bergerak mendekati digital, atau setidaknya bermain di dua kaki yakni mempertahankan bentuk konvensionalnya (*print media* atau *broadcast media*) namun masuk ranah digital lewat internet (*website, social media, live streaming*, dan sebagainya).

Ketiga, dengan meningkatnya kecepatan komunikasi, maka warga di dunia digital akan menuntut informasi politik yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka, baik sisi teknis (medianya) maupun substansinya, untuk menentukan langkah dalam suatu pemilihan umum. Kenyamanan individu akan menjadi bagian integral percakapan politik di masa depan.

Keempat, masyarakat akan mengalami ledakan informasi politik. Mulai dari informasi yang dibagikan oleh media konvensional hingga media digital. Jika tidak dikelola maka ledakan informasi ini akan menjadi kontraproduktif bagi pengembangan demokrasi di masa depan.

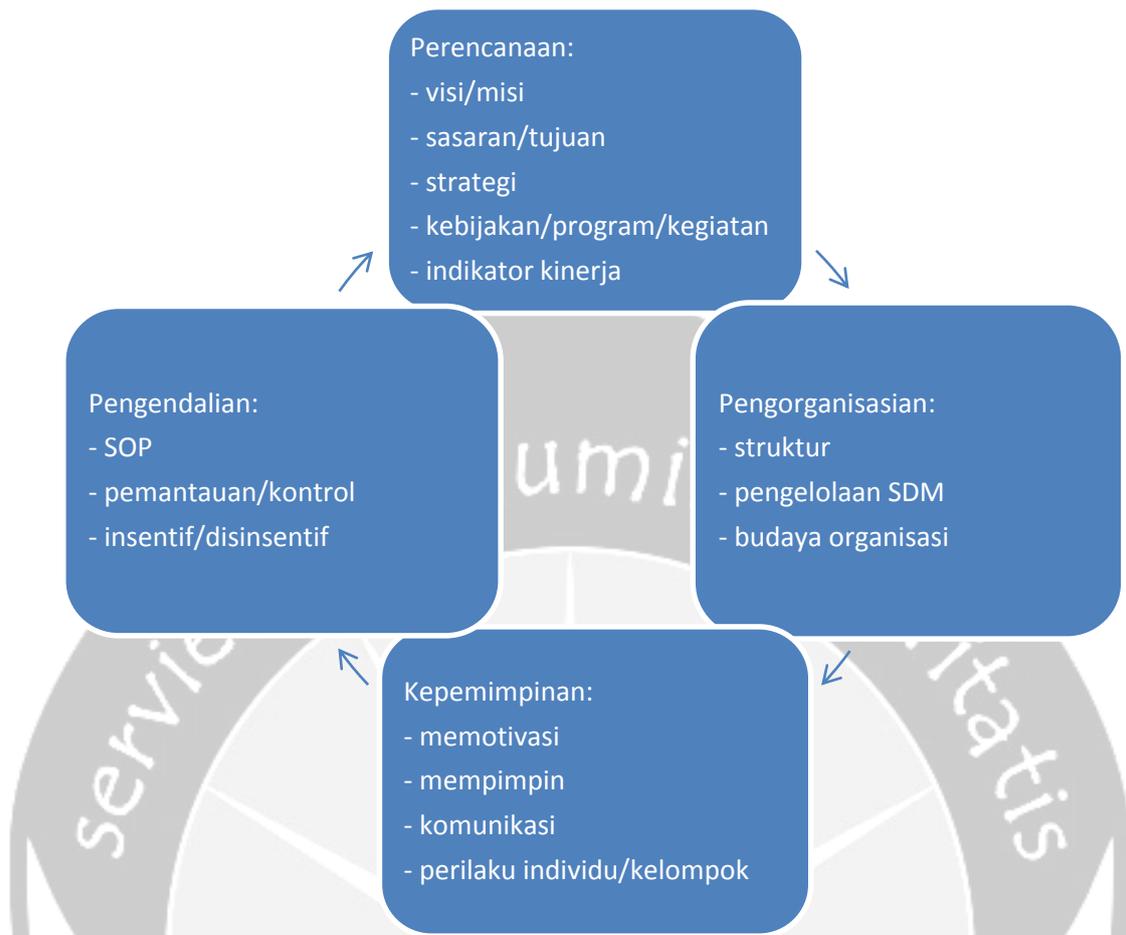
Keempat kebaruan politik dan demokrasi dalam konteks dunia digital di atas membuktikan pernyataan Franklin Roosevelt bahwa "Demokrasi bukanlah hal yang statis." Dunia digital akan membawa politik dan demokrasi lebih dinamis, sebab dunia digital memberi kesempatan kepada orang-orang untuk menyampaikan dan mendiskusikan ide-idenya. Individu tidak lagi bergantung kepada elit. Demokrasi akan semakin kuat sebab basisnya adalah individu yang memiliki kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri.

Pemikiran Winston di atas nampaknya sejalan dengan Barry N. Hague dan Brian D. Loader (1999: 4), ilmuwan komunikasi politik dari Universitas Teseide Inggris, mengenai perubahan paradigma demokrasi di era digital. Lembaga-lembaga politik saat ini berada dalam kondisi lemah dan performanya buruk. Ditandai dengan semakin banyaknya aktor-aktor politik yang melakukan tindakan-tindakan yang merugikan publik: korupsi, kolusi, suap, dan skandal kekuasaan. Munculnya era digital atau era informasi, memberikan kesempatan untuk memikirkan kembali dan, jika perlu, secara radikal merombak atau mengganti mereka yakni lembaga-lembaga politik, termasuk aktornya, yang tidak kredibel dan berkualitas. Era ini mengakhiri era perwakilan demokrasi di abad ke-20.

II.4. Perumusan Rencana Strategis Pembangunan

Perencanaan strategis dalam pemerintahan atau suatu organisasi merupakan bagian dari proses manajemen kinerja organisasi untuk memberi arah bagi kegiatan dan program yang akan dilakukan. Proses awal dari perencanaan strategis dimulai dengan perumusan misi organisasi, sasaran dan tujuan strategis, serta kegiatan-kegiatan strategis untuk mencapainya. Kompilasi dari rencana dan hasil pengukuran serta evaluasi kinerja merupakan bagian integral dari perencanaan strategis suatu organisasi (Lukito 2014: 12).

Menilik proses yang selama ini berjalan di daerah, termasuk di desa, nampaknya perencanaan pembangunan belum sepenuhnya diarahkan ke perencanaan strategis. Namun sebagai panduan teori dalam melaksanakan penelitian ini, perencanaan strategis dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip yang ada di dalamnya yakni perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian. Kepemimpinan menjadi prinsip yang ditambahkan untuk menjamin bahwa perencanaan strategis dilakukan oleh orang yang kompeten dan punya kemampuan memotivasi warga. Skema berikut menjelaskan konsep perencanaan strategis yang dijadikan panduan penelitian ini:



Gambar 1. Perencanaan dan Manajemen Kinerja (Lukito 2014: 12)

II.5. Pemantauan/Kontrol Kinerja Program

Pemantauan penilaian pelaksanaan kebijakan/program dilakukan melalui pengukuran pencapaian indikator kinerja dan dibandingkan dengan target pencapaian yang sudah direncanakan (*comparison*). Informasi yang dihasilkan merupakan dasar untuk analisis penilaian lebih jauh kualitas pencapaian hasil program (Lukito 2014: 56). Dalam konteks penelitian ini, informasi yang digunakan untuk memantau kebijakan/program merupakan informasi yang dikelola oleh media komunitas. Pada titik ini singgungan antara media komunitas dengan pembangunan muncul, yakni penyampaian informasi kepada warga yang dapat digunakan sebagai referensi untuk memantau jalannya kebijakan/program pembangunan.

Pemantauan/kontrol dapat dilakukan melalui dua kriteria yakni pengukuran output dan pengukuran outcomes (Lukito 2014: 57). Pengukuran output dilakukan dengan melihat capaian output, yakni tingkatan produk atau pelayanan yang diberikan oleh program. Adapun pemilihan

indikator pengukuran output sebaiknya dalam bentuk informasi tentang bagaimana program menunjukkan kinerjanya atau dapat disebut juga produktivitas. Produktivitas intinya adalah mengukur seberapa besar output dihasilkan dari satu unit input yang dipakai, jadi merupakan ukuran efisiensi produk. Sedangkan pengukuran outcomes merupakan pengukuran kinerja yang didasarkan pada aspek efektivitas. Pendekatannya bisa dilakukan dengan berbagai cara, tidak hanya melalui penilaian berdasarkan data numerik saja tetapi bisa dalam bentuk pembuktian melalui observasi, catatan data sekunder, rekaman video/foto, atau hasil wawancara dengan penerima manfaat. Pengukuran outcomes menggunakan perspektif penerima manfaat.



BAB III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

a. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana media komunitas memainkan peran sebagai pihak yang mengontrol jalannya pembangunan di daerah. Adapun kontrol yang diberikan bersumber dari informasi warga (sebagai bagian dari media komunitas), dan disampaikan kembali kepada warga. kontrol atau pemantauan dilakukan melalui pengukuran pencapaian indikator kinerja dibandingkan dengan target pencapaian yang sudah direncanakan (*comparison*).

b. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan berbagai data dan informasi seluas-luasnya mengenai fungsi dan peran media komunitas terhadap pembangunan di daerah. Hasil penelitian dapat dijadikan model kontrol yang dapat dikembangkan di daerah dengan memanfaatkan keberadaan media komunitas. Pada waktu sekarang ini semakin signifikan manfaatnya terkait dengan keberadaan dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah pusat kepada tiap desa di Indonesia. Sebagaimana dinyatakan dalam UU Desa pasal 72 ayat (1) mengenai Sumber Pendapatan Desa, bahwa tiap desa akan mendapatkan kucuran dana dari pemerintah pusat melalui APBN lebih kurang 1 miliar per tahun. Apabila desa tidak memiliki sistem kontrol yang baik dan partisipatif, hampir dipastikan turunnya dana desa justru membuat pembangunan tidak jelas arahnya dan rentan dikorupsi.

BAB IV. METODE PENELITIAN

Dilihat dari isu yang akan dijawab yakni telaah fungsi dan peran media komunitas dalam mengontrol jalannya pembangunan, maka penelitian ini digolongkan penelitian kualitatif, dengan paradigma konstruktivis dan strategi penelitian *participant observation* (Hamilton dalam Denzin & Lincoln 1994: 63). Metode penelitian di sini menjadi pegangan operasional untuk mencari dan menganalisis data, khususnya data yang berkaitan dengan topik yang diusulkan. Dalam penelitian ini data dispesifikan berupa dokumen dari media komunitas, dokumen administrasi warga/komunitas, peralatan media komunitas, isu-isu komunitas, dan sebagainya.

Sebagaimana dirancang oleh Denzin & Lincoln (1994: 14-15), penelitian kualitatif berparadigma konstruktivis menggunakan data/temuan lapangan sebagai alat/bahan untuk membangun teori/konsep. Maka urutan pengambilan datanya sebagai berikut:

1. Studi literatur

Mempelajari dokumen terkait media komunitas yang menjadi objek penelitian, juga data administrasi masyarakat/komunitas yang dituju. Mengidentifikasi dengan lebih detail kebutuhan data untuk penelitian

2. Observasi

Melakukan pengamatan terhadap objek penelitian, menggali data dari sumber-sumber primer terutama identifikasi isu dan permasalahan seputar topik penelitian. Selain itu juga melihat fasilitas (fisik) media komunitas

3. FGD

Diskusi terbuka berdasarkan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya (pengolahan saat proses studi literatur dan observasi). FGD menjadi ruang bagi peneliti untuk menajamkan isu yang muncul berdasarkan pengalaman personal objek yang diteliti.

4. Indepth interview

Memilih person-person dalam komunitas yang dianggap memiliki informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, menemui dan menanyai lebih lanjut. Daftar pertanyaan disiapkan sebelumnya dari hasil pengolahan FGD.

5. Interpretasi data

6. Data yang dianggap cukup oleh peneliti kemudian diinterpretasi menggunakan teori/konsep yang sebelumnya telah ditetapkan di proposal. Namun dimungkinkan

peneliti menumculkan pemikiran baru yang dikembangkan dari proses penelitian yang telah berjalan sebelumnya.

Jenis Data	Sumber data	Metode / Teknik
Sekunder	Monografi desa, kecamatan, BPS, dinas kependudukan, dinas pertanian, kesehatan, data hasil penelitian sebelumnya dll	Studi dokumen, hasil penelitian dan pustaka yang relevan
Primer	Masyarakat (individu, kelompok ibu-ibu, paguyuban), pemangku kepentingan (perangkat desa, kecamatan, dinas, LSM dll).	<ul style="list-style-type: none">• Metode yang digunakan adalah survei cepat, observasi partisipasi.• Teknik penggalian data yang digunakan adalah lobi-lobi, wawancara mendalam (<i>indepth interview</i>), diskusi kelompok terfokus (<i>focus group discussion</i>), alur sejarah dan lain-lain sesuai kebutuhan

BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN

V.1. Hasil dan Pembahasan Fungsi dan Peran Media Komunitas Dalam Mengontrol Pembangunan di Daerah: Speaker Kampung (Lombok Timur)

V.1.a. Gambaran Wilayah Ketangga

Speaker Kampung merupakan sebuah media komunitas yang dikelola oleh para anak muda Desa Ketangga, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur. Media komunitas ini didirikan pada tahun 2012, dengan format buletin (media cetak), kemudian berkembang ke format lain seperti blog, televisi dan online. Sebelum lebih jauh bicara tentang Speaker Kampung, baik juga jika kita mengenal desa Ketangga sehingga sedikit banyak memahami konteks keberadaan media komunitas tersebut.

Perjalanan peneliti ke desa Ketangga sangat menyenangkan. Setiba di bandar udara internasional Praya, peneliti sudah dijemput naik motor oleh Awenk Abu Zakira (Awenk). Dengan memanggul tas ransel dan tas cangklong, kami menelusuri jalan aspal selama dua jam (71 Km), dengan istirahat dua kali untuk makan siang dan menemani Awenk untuk sholat di sebuah mesjid. Perjalanan kami sangat lancar. Jalan yang berkelok-kelok dan sedikit menanjak relatif beraspal halus. Kami sangat beruntung, walau ada di pertengahan Januari, kami tidak terkena hujan deras. Hujan gerimis baru menerpa kami satu km menjelang sampai di kediaman Eros.

Desa Ketangga terletak di dataran 500m dari permukaan laut. Tidak jauh dari desa ini, sekitar 13 Km atau 20 menit perjalanan, terletak pelabuhan Labuhan Lombok. Jarak dari ibukota Kabupaten Lombok Timur adalah 35 Km, yang bisa ditempuh selama satu jam dengan kendaraan bermotor. Desa Ketangga terletak 75 Km sebelah Timur kota Mataram Jarak tersebut bisa ditempuh selama dua jam dengan kendaraan bermotor. Desa ini letaknya cukup strategis, dilewati Jalan Pariwisata Suela (Portal Desa Ketangga, tanpa tanggul).

Desa Ketangga berbatasan dengan beberapa desa, yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sungalangu; sebelah Selatan dengan Desa Selaparang; sebelah Barat dengan Desa Bagek Papan serta sebelah Timur dengan Desa Suela. Desa Ketangga merupakan desa yang cukup padat. Rumah-rumah yang ada di perkampungan saling berhimpitan. Mesjid sangat mudah ditemui di kampung ini, seperti daerah-daerah lainnya di Lombok. Kadang-kadang jarak antar mesjid hanya puluhan meter. Pantas jika Lombok dikenal sebagai Pulau Seribu Mesjid. Jumlah penduduk pada tahun 2014 sebagai berikut: laki-laki 3602 orang dan

perempuan 3820 orang. Sumber penghasilan utama dari penduduk adalah dari pertanian (Portal Desa Ketangga, tanpa tanggal).

Desa Ketangga memiliki posisi unik dalam sejarah masyarakat pulau Lombok karena di desa ini terdapat peninggalan Kerajaan Selaparang, walau sisa bangunan kratonnya sudah sulit ditemui. Salah satu peninggalan fisik yang penting adalah Mesjid Pusaka. Mesjid ini berada di tengah perkampungan padat. Di dalam Mesjid Pusaka terdapat beberapa peninggalan kuno seperti, Al-Qur'an bertulis tangan, *sabuk belo*, *tangiang*, dan peralatan perang. Saat peneliti diajak menyusuri lingkungan mesjid, peneliti melihat tulisan Jawa kuno pada bagian tembok mesjid. Hal ini menunjukkan bahwa Mesjid Pusaka ini masih berhubungan dengan sejarah kebudayaan Jawa.

Wilayah Ketangga dekat dengan berbagai objek budaya dan wisata, seperti Mesjid Pusaka, kebudayaan Sasak, kawasan Kebun Raya Lemor, Pantai Pidana dan Hutan Lian tempat pohon purba serta kawasan Sembalun. Tidak ketinggalan adalah keindahan Gunung Rinjani (3.726 m dari permukaan laut) dapat dilihat dengan jelas dari Ketangga karena desa ini memang terletak di kaki gunung yang terkenal tersebut. Besarnya potensi wisata tersebut membuat para pemuda di sana peduli dengan persoalan wisata. Hasil dari kepedulian itu membuat Eros berhasil menjadi Pemuda Pelopor Bidang Budaya dan Pariwisata pada tahun 2008. Pengalaman menjadi pemuda pelopor sangat mengesankan bagi Eros ia berhasil mendapat kesempatan "melihat Monas di Jakarta."

Sebagai desa yang berada di wilayah Kabupaten Lombok Timur, masalah sosial yang perlu mendapat perhatian adalah pernikahan dini. DI Lombok Timur, tercatat 9000 pernikahan dini setiap tahunnya. Dampak dari pernikahan dini adalah tingkat pendidikan masyarakat yang rendah karena banyak remaja putus sekolah serta tingginya tingkat kelahiran. Menurut Suroto, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana (BPPKB), tingkat pertumbuhan penduduk ini melebihi tingkat pertumbuhan ketersediaan pangan (Radar Lombok, 2016).

V.I.b. Sejarah Singkat Speaker Kampung

Walau saat ini Speaker Kampung dikenal sebagai media komunitas, namun keberadaan awalnya dimulai dari kiprah budaya para pendirinya. Menurut Hajad Guna Roasmadi (Eros), sejarah awal Speaker Kampung tidak terlepas dari Sanggar Anak yang berdiri pada tahun 1999, saat Eros masih duduk di bangku SMP. Saat itu, kegiatan berkeseniannya berupa musik dari berbagai peralatan dapur, bambu dan kayu sebagai tanggapan atas peristiwa gerhana matahari. Dahulu setiap ada gerhana matahari, ada kepercayaan orang-orang harus membuat kebisingan dengan memukul berbagai benda agar matahari dapat bersinar kembali.

Berawal dari aktivitas tersebut, mereka serius bermain musik dan akhirnya membentuk sanggar *Olor Chetok*. Nama sanggar itu diambil dari bahasa Sasak. *Olor* berarti parit, sedang *chetok* berarti dangkal. Parit dangkal itu memanjang melintas kampung, tidak terlihat hulu dan hilirnya, sehingga nampak tidak terputus tanpa berakhir. Bagi mereka, hal tersebut seperti pengharapan terhadap sanggar *Olor Chetok* yang tidak akan mati eksistensinya. Kehadiran sanggar ini dimaksudkan untuk mengatasi persoalan anak muda Ketangga seperti mabuk-mabukan dan berfoya-foya. Mereka melihat bahwa masalah sosial tersebut bisa diatasi jika ada kegiatan positif bagi para pemuda sehingga mereka bisa berkreatifitas. Berbagai kegiatan sanggar ini antara lain: musik, teater dan pecinta alam. Kemudian muncul nama “Seruan Pemuda Kreatif” bagi anak-anak kampung atau disingkat Speaker Kampung (wawancara dengan Eros 18 Januari 2017).

Kegiatan anak-anak muda tersebut tidak berhenti di sana. Mereka kemudian berpikir untuk mengembangkan media berekspresi. Salah satu motivasi untuk terlibat di dalam media komunitas adalah situasi yang tidak menguntungkan para pemuda. Mereka melihat pemuda masih kurang diperhatikan oleh pemerintah, dari tingkat desa sampai kabupaten. Para pemuda selama ini hanya dimanfaatkan saat pemungutan suara. Dengan adanya media komunitas, maka mereka bisa menyuarakan aspirasi pemuda, juga situasi wilayah mereka (wawancara dengan Eros, 17 Januari 2017).

Sebelum mendirikan Speaker Kampung, Eros sendiri sudah memiliki pengalaman terjun di jurnalisme warga, melalui kiprahnya di Kampung Media (www.kampung-media.com), Rumah Alir (www.rumahalir.or.id) dan radio Lombok FM. Pengalaman Eros tersebut nampaknya mewarnai kiprah Speaker Kampung untuk mengembangkan diri dalam jurnalisme warga.

Jurnalisme warga dipandang oleh mereka untuk mengasah sensitifitas akan persoalan desa serta mendorong perhatian para pengambil keputusan untuk memiliki informasi atas persoalan desanya. Kepedulian akan lingkungan desanya dilakukan melalui reportase melalui media komunitas. Pelaksanaan pengawasan lingkungan dijalankan oleh para pengelola Speaker Kampung. Jurnalisme warga di Spekaer Kampung adalah bagian aktivitas warga untuk menjalankan hak dan kewajibannya, untuk ikut bertanggungjawab atas terciptanya perbaikan kondisi bersama. Dalam konteks ilmu sosial, aktivitas ini bisa dilihat melalui *citizenship*. Uraian berikut bisa menjelaskan bagaimana pengalaman hidup sehari-hari menjadi pendorong warga melakukan sesuatu dengan media komunitasnya.

Aktivitas media komunitas tidak terlepas dari pergulatan atau pengalaman yang menerpa para aktivisnya. Sebagai contoh, seperti sudah diungkapkan sebelumnya, kehadiran

Speaker Kampung tidak lepas dari kiprah dari salah satu pendirinya yaitu Eros. Pemuda kelahiran 15 Juni 1984 di desa Ketangga merupakan anak kedua dari empat bersaudara. Ada kisah yang menarik tentang tempat kelahirannya. Ia menjelaskan bahwa ia merupakan satu-satunya anak dari keluarganya yang lahir di desa Ketangga, tempat kelahiran ayahnya. Saudaranya yang lain lahir di desa ibunya. Ternyata ada kebiasaan di daerahnya bahwa ketika seorang perempuan akan melahirkan anak, ia akan kembali ke rumah orang tuanya. Mengapa demikian? Hal ini akibat para calon ibu tersebut melakukan pernikahan pada usia dini, sekitar usia 13-14 tahun sehingga para perempuan tersebut memiliki pengetahuan yang terbatas dan rentan dalam melahirkan anak. “Karena mungkin kapasitas dan kemampuan ibu ini, karena menikah di usia masih kecil, tamat SD sudah kawin,” ungkap Eros (wawancara 17 Januari 2017).

Di Lombok Timur, fenomena pernikahan dini tersebut merupakan persoalan tersendiri, sehingga tidak mengherankan jika para relawan Speaker Kampung memberi perhatian pada persoalan ini. Terlihat pada salah satu sisi dinding studio ada poster yang dengan kalimat bergaya bahasa anak muda, “Hari gini masih menikah dini?”. Mereka juga mengangkat keprihatinan terhadap pernikahan dini ini ke dalam tulisan “LPA Lotim Dukung Gerakan Anak Dalam Antisipasi Kejahatan” (Speaker Kampung, 16/5/2016). LPA di sini adalah Lembaga Perlindungan Anak dari Kabupaten Lombok Timur. Dalam berita tersebut, LPA bekerjasama dengan LSM Gagas Foundation melakukan pembentukan Sanggar Alang bagi anak-anak untuk menghindari pernikahan dini serta kejahatan yang mengancam anak-anak.

Bagi Speaker Kampung, pernikahan dini memberi dampak besar bagi kualitas kesejahteraan anak. Ada cerita saat peneliti mengunjungi SMP Islam Bilakembar. Dalam perbincangan di SMP tersebut, para guru mengungkapkan bahwa salah satu isu penting dalam dunia pendidikan di sana adalah mencegah siswi-siswi SMP menghilang di tengah jalan. Maksudnya, mereka tidak meneruskan sekolah karena menikah. Ironisnya, pernikahan tersebut sering tidak berumur panjang, yang berakhir dengan perceraian.

Masalahnya para ibu muda tersebut memiliki anak sehingga mereka harus menjadi orang tua tunggal. Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, pilihan populer di sana adalah menjadi tenaga kerja wanita di luar negeri. Dengan demikian para ibu muda ini harus hidup terpisah dengan anaknya. Pengasuh anak tersebut diserahkan ke orang tua si ibu. Pada perkembangannya, pola asuh tersebut berpotensi memunculkan masalah kesejahteraan anak, seperti perhatian dan putus sekolah. Jadi persoalan kesejahteraan anak di sana bagai lingkaran setan. Sebenarnya untuk mencegah para siswi berhenti sekolah, di SMP Islam Bilakembar

ditetapkan sanksi denda, namun kenyataannya bentuk sanksi ini tidak efektif mencegah siswi berhenti sekolah untuk menikah (obrolan dengan Rasyid Ridho dan para guru 19 Januari 2017).

Perkembangan menarik dari Speaker Kampung adalah pendirian Speaker TV. Televisi ini memanfaatkan jaringan televisi kabel atau berbayar yang ada di desa Ketangga. Maraknya penyebaran televisi kabel di Lombok, termasuk di Ketangga, memberi inspirasi bagi Speaker Kampung untuk memanfaatkannya. Di Ketangga sendiri terdapat tiga pengusaha televisi kabel. Salah satu perusahaan mengaku memiliki 400 pelanggan di desa Ketangga. Setiap pelanggan membayar Rp 10.000,- perbulan. Pengusaha televisi kabel tersebut mengaku bahwa usahanya ini masih usaha sambilan karena hasilnya belum bisa diandalkan. Untuk menghemat biaya, hampir semua pekerjaan (pemasaran, pelayanan, pemasangan alat dan perbaikan) dilakukan sendiri.

Tersedianya jaringan kabel yang ditarik dari satu rumah ke rumah pelanggan lainnya merupakan suatu fasilitas yang luar biasa bagi Speaker Kampung. Ide tersebut kemudian disampaikan ke salah satu pengusaha televisi kabel untuk dilakukan kerjasama. Speaker TV diperbolehkan menggunakan jaringan televisi kabel tersebut dengan gratis.

Pendirian Speaker TV bermula dari kesulitan mereka untuk beraktivitas dengan radio komunitas Ninanta FM karena persoalan tidak memiliki ijin dari pemerintah. Kemudian mereka melihat peluang adanya jaringan televisi kabel di desa mereka. Jaringan tersebut dipandang mampu mengakomodasi keinginan berekspresi melalui aktivitas dengan televisi komunitas. Speaker TV memulai siarannya pada tahun 2014.

Keberadaan Speaker TV ini cukup unik. Ketika berbicara stasiun televisi, Anda jangan membayangkan akan mendapati studio yang mentereng dan peralatan canggih di Speaker TV. Tempat yang difungsikan studio adalah beranda rumah dari keluarga Eros, yang terletak di gang Guru Sidiq, di tepi jalan utama Jl. Wisata Lemor. Pemandanya adalah *backdrop* besar bertuliskan Speaker TV di dinding beranda. Di situlah mereka sering merekam acara, seperti wawancara, acara hiburan, *talkshow*. Di sebelah pojok beranda ada ruangan kecil yang berfungsi sebagai tempat editing, dengan PC sebagai perangkat utamanya. Alat produksi berupa kamera *handphone* dan *video camera* untuk pengambilan gambar. Proses produksinya sebagai berikut: aktivis merekam kegiatan di sekitar wilayah mereka. Pengambilan gambar bisa direncanakan maupun spontan. Rekaman yang direncanakan seperti acara di studio atau wawancara. Kadang-kadang secara spontan mereka merekam kegiatan warga yang menarik, seperti kumpul-kumpul warga yang sedang berkesenian. Hasil rekaman kemudian diedit melalui komputer di studio. Setelah editing, file disimpan di *flash disk*. *Flash disk* digunakan

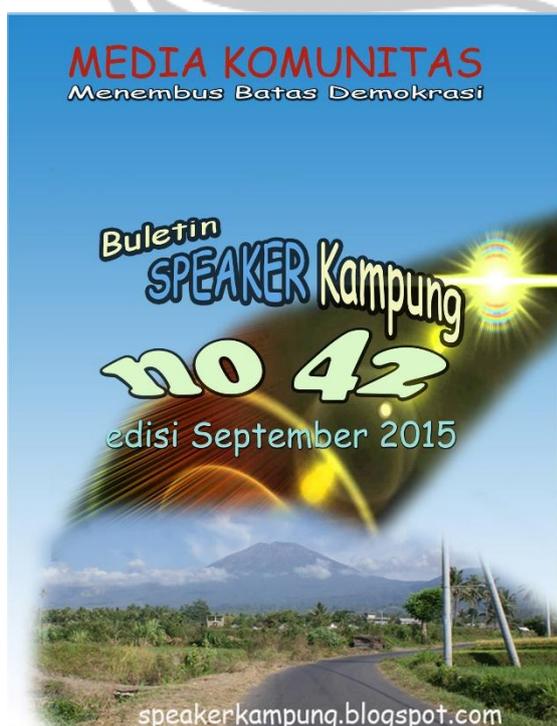
untuk melakukan transfer ke stasiun jaringan televisi kabel lewat di modul. Terakhir, stasiun televisi kabel memancar luaskan video ke warga melalui jaringan televisi kabelnya.

Tidak semua acara yang ditayangkan Speaker TV merupakan hasil produksinya. Sebagian diambil dari internet. Speaker TV juga menayangkan produksinya melalui youtube yang bisa diakses melalui speakerampung.blogspot.

V.I.c. Kemandirian Speaker Kampung Sebagai Media Komunitas

Speaker Kampung menjalankan kegiatannya berdasar pada kemandirian. Mereka menjalankan suatu usaha untuk membiayai operasional media komunitasnya. Eros menceritakan saat mereka membuat Buletin Speaker Kampung, mereka mengadakan usaha studio foto. “Saya buat studio, kita di buletin setiap perbulan diterbitkan, dari dananya itu kita bisa buat buletin itu dengan berapa kali cetak printer”. Melalui kreatifitasnya, mereka berusaha menangkap berbagai peluang di sekitar mereka. Berbagai acara yang dilayani dengan jasa foto antara lain: wisuda taman kanak-kanak, pembuatan kartu tanda penduduk. Hasil dari jasa tersebut digunakan untuk membiayai pencetakan dan operasional buletin Speaker Kampung. Setiap terbit, Speaker Kampung dicetak 30-50 eksemplar yang dibagikan ke berbagai tempat (wawancara dengan Eros, 17 Januari 2017).

Kemandirian ini sampai sekarang tetap dilakukan dalam pengelolaan Speaker Kampung. Setiap ada kegiatan yang mendatangkan pemasukan sebagian digunakan untuk pembiayaan. Soal pembiayaan ini, ada rencana aktivis Speaker Kampung untuk beternak agar memperoleh pemasukan yang rutin.



V.I.d. Partisipasi Speaker Kampung Dalam Pengawasan Pembangunan

Warga harus mendapat informasi tentang apa yang dilakukan pemerintah yang terkait dengan kepentingan warga. Transparansi merupakan syarat utama untuk mengontrol proses pembangunan terhindar dari praktek korupsi dan salah urus. Untuk menjamin informasi bisa mengalir ke warga dan aspirasi warga bisa didengar pemerintah, maka aktivis Speaker Kampung melihat bahwa warga harus melakukan tindakan aktif, yang antara lain dengan memanfaatkan media komunitas. Dalam bagian ini, peneliti akan menguraikan kiprah Speaker Kampung dalam mendorong transparansi di wilayahnya.

Beberapa isu yang menjadi perhatian mereka adalah pembangunan fisik berupa sekolah, jalan, kesehatan, pernikahan dini, pemilihan kepala desa, pelestarian budaya Sasak, lingkungan hutan, pengawasan proyek pembangunan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri). Liputan soal PNPM Mandiri pernah membuat Eros dilaporkan ke pihak berwenang. Peristiwa tersebut bermula dari tulisan Eros tentang pengelolaan PNPM di tahun 2010 yang diunggah ke web Rumah Alir, sebuah web yang ditujukan bagi sistem informasi komunikasi Kongres Sunda Kecil (Bali, NTT, NTB, Maluku dan Maluku Utara). Melalui tulisannya, Eros bermaksud untuk mendorong keterbukaan informasi. Tulisan tersebut baru diperkarakan pada tahun 2012, dan diancam akan dilaporkan ke polisi. Tulisan Eros dianggap membunuh karakter pengurus PNPM. Selain itu, tulisan tersebut dianggap dapat menghambat pembangunan karena dana PNPM untuk desa Ketangga bisa tidak dicairkan.

Eros kemudian dipanggil oleh Forum Komunikasi PNPM, pemerintah desa, kecamatan dan kabupaten. Kasus ini cukup membuat *shock* yang bersangkutan, walau Eros sendiri berusaha tenang karena ia merasa benar sesuai hukum. Apalagi ia merasa sudah menjalankan prinsip jurnalistik yang seimbang, dengan mencari informasi dari berbagai sumber saat menulis artikel tersebut. Ketika menghadapi kasus ini, Eros merasa pengetahuan hukum yang dimilikinya (ia seorang sarjana hukum) serta penggunaan prinsip jurnalistik sangat membantunya.

Untuk mendukung posisinya, Eros sempat berkomunikasi dengan Muhammad Syairi, salah seorang aktivis radio komunitas Primadona FM, desa Karang Bajo, Lombok Utara. Syairi memberi semangat kepadanya untuk yakin atas langkah yang sudah dilakukannya. Menurut Syairi, yang penting sudah melakukan konfirmasi. Saat itu radio komunitas masih berjalan. Pada tahun 2014, radio komunitas Ninanta FM melakukan liputan terhadap pelaksanaan PNPM Mandiri, walau nampaknya tidak terlalu ditanggapi pengurus PNPM Mandiri, misalnya tidak hadir pada undangan talkshow di radio tersebut karena suatu hal.

”Seperti acara talk show di radio kami sering mengundang pelaku PNPM, namun sering tidak menghadirinya” Jelas Ingkong saat dikonfirmasi 26/3/2014 (Kampung Media, 29/3/2014) .

Namun untuk memenuhi akses terhadap informasi, relawan radio melakukan wawancara langsung dengan pengurusnya. Menurut Eros, liputan tersebut membawa dampak terhadap pengelolaan PNPM. Pihak desa ikut mencermati PNPM, karena sebelumnya pihak desa tidak pernah ikut campur tangan (wawancara dengan Eros, 18 Januari 2017).

Dampak dari liputan jurnalisisme warga bisa dilihat dari desakan untuk memperbaiki fasilitas jalan di Bilakembar. Bilakembar merupakan bagian dari desa Suela, satu kecamatan Suela dengan Desa Ketangga. Sebelum tahun 2015, jalan menuju Bilakembar dalam kondisi buruk sehingga mobilitas warga terhambat. Melihat kondisi yang demikian, Speaker Kampung melakukan liputan atas situasi tersebut untuk menarik perhatian pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Speaker Kampung ingin mendorong perubahan terhadap kondisi jalan tersebut sehingga dirasa perlu untuk menaikkannya ke dalam liputannya. Liputan tersebut berhasil menggugah pemerintah daerah dan masyarakat untuk melakukan tindakan. Melalui gotong royong masyarakat dan dukungan pemerintah, akhirnya kondisi jalan yang menembus Bilakembar berubah baik. Saat peneliti melintas di sana, nampak kondisi sebagian jalan sudah ditutup aspal mulus. Eros mengatakan, bahwa liputan Speaker Kampung saat itu memang disengaja untuk menggugah pemerintah daerah untuk memperbaiki jalan tersebut.

Liputan yang mereka lakukan, bisa memunculkan risiko. Pada tahun 2014, radio komunitas Ninanta FM melakukan liputan terhadap pelaksanaan PNPM Mandiri, walau nampaknya tidak terlalu ditanggapi pengurus PNPM Mandiri, misalnya tidak hadir pada undangan talkshow di radio tersebut karena suatu hal. ”Seperti acara *talk show* di radio kami sering mengundang pelaku PNPM, namun sering tidak menghadirinya” Jelas ingkong saat dikonfirmasi 26/3/2014 (Kampung Media, 29/3/2014) . Namun untuk memenuhi akses terhadap informasi, relawan radio melakukan jemput bola, yaitu melalui wawancara langsung dengan pengurusnya.

Dalam rangka memberdayakan masyarakat untuk melakukan pengawasan dalam pembangunan, Speaker Kampung diajak oleh LSM Somasi (Solidaritas Masyarakat Untuk Transparansi) untuk menggalakkan jurnalisisme warga. Menurut LSM Somasi, jurnalisisme warga dapat menjadi garda depan dalam proses pengawasan pembangunan karena para relawannya merupakan warga desa yang bersangkutan, sehingga keterlibatan dalam persoalan yang ada akan berorientasi pada pemecahan masalah. Demikian juga dengan program kerja LSM Somasi terkait dengan pelayanan kesehatan masyarakat di tiga desa kecamatan Aikmel Lombok Timur.

Pelayanan kesehatan sangat penting diperhatikan akuntabilitasnya karena hal ini merupakan kebutuhan dasar untuk kesejahteraan warga. Oleh karena itu, untuk menjamin pelayanan yang berkualitas, jurnalisme warga dapat bermanfaat untuk mendorong terciptanya pelayanan kesehatan yang baik oleh pemerintah (wawancara dengan Herul Anwar, 2017). Langkah-langkah yang mereka lakukan antara lain dengan pemberdayaan warga untuk lebih mengetahui hak-hak mereka untuk mendapat pelayanan kesehatan. Pemberdayaan warga tersebut antara lain berupa pembelajaran dalam organisasi kelompok warga. Saat ini kelompok warga yang jadi fokus adalah keluarga dan atau Anak Buruh Migran, Disabilitas dan Perempuan Miskin. Mereka akan menjadi kelompok belajar, tempat berbagi informasi dan akan menjadi mitra pemerintah desa agar tercipta akuntabilitas dalam pelayanan masyarakat (speakerampung.net, 24/3/2017).

Mengapa LSM Somasi megajak kerjasama Speaker Kampung? Herul yang saat ini aktif di LSM Somasi mengikuti sejak awal dan ikut berjuang mendorong hadirnya jurnalisme warga melalui media komunitas. Ia melihat perjalanan Speaker Kampung dalam mempromosikan jurnalisme warga. Herul bersama dengan Eros dan Rasyid juga yang mengawali pendirian Speaker Kampung pada tahun 2012.

Keterlibatan Speaker Kampung di dalam kegiatan jurnalisme warga sejalan dengan keinginan mereka untuk lebih terlibat dalam proses-proses pembangunan di wilayahnya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mendukung inisiatif Kabupaten Lombok Timur untuk membentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). Berbagai KIM dari 60 desa di Lombok Timur bergabung di dalam Forum Kelompok Informasi Masyarakat (FORKIM). Dalam kaitan memaksimalkan peran warga dalam mengontrol proses pembangunan, Pada awal tahun 2017, Speaker Kampung bermitra dengan LSM Somasi akan memberdayakan masyarakat di tiga desa Kecamatan Aikmel terkait dengan isu program kesehatan. Speaker Kampung akan berfokus pada kerja-kerja jurnalisme warga untuk mendorong keberhasilan program kesehatan di kecamatan tersebut. Di sini mereka menunjukkan bahwa jurnalisme warga adalah bagian aktivitas warga untuk menjalankan hak dan kewajibannya, untuk ikut bertanggungjawab atas terciptanya perbaikan kondisi bersama. Dalam konteks ilmu sosial, aktivitas ini bisa dilihat melalui *citizenship*.

Kegiatan aktivis Speaker Kampung tidak melulu soal isu pembangunan fisik, namun juga menyentuh isu mental-spiritual. Ketika belakangan ini muncul persoalan negatif dari penyebaran informasi lewat media sosial seperti *hoax*, mereka segera merespon dengan pendekatan literasi yang mereka namakan Batur. Nama tersebut merupakan kependekan dari baca-tulis-tutur, yang sekaligus menunjukkan rangkaian kegiatan literasi. Pengertian *hoax*

secara umum adalah informasi palsu yang sengaja dibuat dan disebar untuk mempengaruhi keyakinan khalayak. Boleh dikata ini adalah bentuk tipuan atau manipulasi informasi yang canggih sehingga *hoax* dianggap sebagai informasi benar. *Hoax* ini bukan hasil dari interpretasi berbeda pada suatu peristiwa namun lebih merupakan suatu upaya yang dilakukan secara sengaja oleh pembuatnya untuk membelokkan kebenaran.

Pengaruh *hoax* dapat terjadi oleh karena rendahnya literasi media di masyarakat, yang dapat dilihat pada: minimnya usaha untuk melakukan verifikasi atas informasi yang diterima, motivasi untuk menjadi yang pertama dalam penyebaran informasi, serta tidak ada sumber informasi (seperti media arus utama) yang dianggap kredibel untuk mendapat verifikasi.

Literasi media sendiri bertujuan untuk memberdayakan masyarakat, di mana mereka diberdayakan untuk memiliki kompetensi memanfaatkan informasi. Bahkan mereka bisa terlibat dalam proses produksi informasi. Cita-cita media komunitas untuk menempatkan masyarakat sebagai pihak yang aktif, sejalan dengan ide dasar literasi media. Frank Biocca (1988) membedakan *audience* atau khalayak menjadi khalayak aktif dan pasif. Beberapa karakteristik yang dimiliki oleh khalayak aktif adalah: Pertama, khalayak aktif dianggap selektif ketika mengkonsumsi media yang akan digunakan. Kedua, utilitarianisme (utilitarianism), khalayak dianggap aktif apabila ketika mengkonsumsi suatu media selalu dilatarbelakangi kepentingan dan tujuan. Mereka mengkonsumsi media untuk memenuhi kepentingan serta kebutuhan yang mereka miliki. Karakteristik yang ketiga adalah intensionalitas (intentionality), yaitu menggunakan secara sengaja. Dalam konteks ini, khalayak harus bersikap aktif ketika mengkonsumsi suatu media tidak hanya 'sekarang' menonton saja. Artinya, saat menonton, mereka memiliki tujuan untuk memperoleh manfaat positif. Keempat, keikutsertaan (involvement), yaitu alasan yang selalu menyertai ketika mereka mengkonsumsi media. Kelima, khalayak aktif dianggap sebagai khalayak yang tidak mudah terpengaruh dan tidak mudah dibujuk oleh rayuan media (Littlejohn & Gray, 2001, p. 333).

Mengingat remaja merupakan pengguna media sosial, maka bagi aktivis Speaker Kampung, salah satu cara untuk menangkali *hoax* adalah dengan memperkuat pengetahuan remaja sehingga pengetahuan tersebut menjadi filter diri dari serbuan *hoax*. Pengetahuan antara lain diperoleh dengan banyak membaca. Namun agar menjadi pembaca aktif, mereka diminta untuk menulis hal-hal menarik dari bacaan tersebut, lalu membagikannya (lewat tuturan) kepada teman-temannya. Penulis melihat sendiri di SMP Islam Bilakembar, siswa-siswa mempraktekkan kegiatan BATUR ini. Dan bukan kebetulan jika salah satu guru sekolah tersebut, Rasyid Ridho, adalah termasuk pelopor Speaker Kampung.

Penulis menilai bahwa proses kegiatan BATUR berpotensi untuk membangun kesadaran peserta tentang “dunianya” atau lingkungan sekitarnya, karena ada proses penyerapan informasi, refleksi atas informasi dan sharing informasi. Artinya, informasi yang mereka dapatkan tidak mentah-mentah ditelan. Berdasar obrolan dengan Eros, salah satu pendiri Speaker Kampung, agar proses kegiatan Batur memberi inspirasi bagi yang lain, maka kegiatan tersebut disebarakan melalui Speaker TV, salah satu media dari Speaker Kampung.

V.2. Hasil dan Pembahasan Fungsi dan Peran Media Komunitas Dalam Mengontrol Pembangunan di Daerah: Pendowo FM (Sidoarjo)

V.2.a. Sejarah Singkat Pendowo FM

Pendowo FM memiliki sejarah panjang sebagai sebuah radio komunitas. Diawali dari keprihatinan sekelompok remaja (salah satunya Widodo – pendiri Pendowo FM) yang tidak puas dengan maraknya berbagai media baik cetak dan elektronika yang tidak bisa mengakomodasikan kepentingan masyarakat kelas menengah dan bawah, khususnya di Desa Balongbendo, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo. Maka pada tanggal 1 Juli 2003 mereka mendirikan radio komunitas dan mengudara sehari penuh. Dalam wawancara dengan Widodo (Selasa, 17 Januari 2017), berdirinya Radio Komunitas Pendowo merupakan bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat kelas menengah ke bawah terhadap media cetak dan elektronik. Terutama untuk mendapatkan informasi, serta memanfaatkannya untuk memenuhi dan memperbaiki kehidupan sosial serta ekonominya. Dengan kata lain lembaga penyiaran harus tanggap terhadap kebutuhan informasi masyarakat meskipun tidak mengandung unsur bisnis. Menurut Widodo hal ini tidak bisa dilakukan oleh lembaga penyiaran swasta yang mempunyai tujuan utama keuntungan (*profit oriented*).

Paguyuban dipilih oleh Pendowo FM sebagai bentuk kelembagaannya. Menurut Widodo (Wawancara 17 Januari 2017) langkah ini dipilih untuk menumbuhkan rasa memiliki dan memupuk kebersamaan, karena pada hakekatnya radio komunitas Pendowo FM adalah lembaga bersama yang akan memenuhi kebutuhannya sendiri meskipun produk yang akan disampaikan dinikmati masyarakat luas bukan hanya anggota paguyuban saja. Widodo meyakini bahwa pendirian Pendowo FM merupakan salah satu bentuk semangat kebangsaan yang mempunyai nilai luhur, sesuai dengan semboyan yang dipatrikan dalam Pendowo FM yakni menjaga Indonesia, menegakan kebersamaan.

Adapun visi Pendowo FM adalah bagian dari masyarakat baik sebagai subyek sekaligus obyek informasi. Subyek informasi artinya, masyarakat harus mampu mencari sekaligus menyampaikan informasi yang benar dan sesuai dengan yang dibutuhkan audiens Pendowo

FM. Selain itu, Pendowo FM diharapkan bisa menghimpun kearifan lokal khususnya di Desa Balongbendo, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo yang menjadi identitas sekaligus sumber inspirasi dalam menata kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Sedangkan masyarakat sebagai obyek informasi adalah masyarakat sebagai penerima informasi tidak diperlakukan sebagai audiens yang bodoh, tapi diajak untuk berpikir lebih maju serta obyek yang bisa memilih menu informasi sesuai kebutuhan hidupnya. Pendowo FM bervisi untuk melakukan hal tersebut, menjadikan audiens sebagai pihak yang aktif dan dinamis, bisa diberdayakan lebih lanjut untuk kesejahteraan bersama.

Sedangkan visi Pendowo FM: 1) Menghadirkan informasi yang mendidik (edukatif) dan memberikan jalan keluar atau penyelesaian (solutif). 2) Pendowo FM menyebarluaskan aktifitas yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. 3) Memberikan pencerahan dan pembelajaran kepada masyarakat. 4) Mengumpulkan kearifan-kearifan lokal yang menjadi identitas dan semangat dalam menjalankan setiap aktivitas.

V.2.b. Legalitas Pendowo FM

- Nama Stasiun di udara : Pendowo
- Alamat Kantor : Jl Gajah Mada No:336 Semawut Balongbendo
Sidoarjo 61263
- Alamat Studio : Jl Gajah Mada No:336 Semawut Balongbendo
Sidoarjo 61263
- E-mail : radio_pendowo@plasa.com
- Akta Pendirian : Nomor 9 tanggal 8 November 2008
- Notaris : Asriningtyas Asmoro, SH
- Pengesahan PN Sidoarjo : 41/956/PKP/XI/2008
- Ijin gangguan : 509/404.5.11.01/2003
- Instansi yang menerbitkan : Pemerintah desa Balongbendo
- Ijin bangunan : 579 Tahun 2006
- Instansi yang menerbitkan : Dinas Perijinan dan Penanaman Modal
- Ijin Bangunan menara : 312 Tahun 2008

V.2.c. Riwayat Kepemilikan Pendowo FM

Pada awal pendirian radio tersebut di tanggal 1 Juli 2003, saham tercatat seluruhnya dimiliki oleh paguyuban pendawa dengan nilai kekayaan Rp. 28.000.000,-. Dalam perjalanan

waktu mendapat tambahan modal dari beberapa anggota, dengan cara memberikan sejumlah saham oleh beberapa anggota paguyuban Pendawa, dengan perincian sebagai berikut :

- 18 Juli 2006, mendapat sumbangan saham oleh Ripain dengan alamat Dusun Kedinding, Tarik, Sidoarjo sebesar 10% dengan nilai Rp. 2.800.000,-.
- 5 Desember 2006, mendapat sumbangan saham lagi oleh Sugio dengan alamat Dusun Lebani Waras, Wringinanom, Gresik. Sebesar 5% dengan nilai Rp. 1.400.000,-.
- 7 Mei 2007 mendapat sumbangan saham oleh Karsono dengan alamat Sumengko, Wringinanom, Gresik dengan nilai 4% sebesar Rp. 1.120.000,-.

V.2.d. Profil Siaran Pendowo FM

Pendowo FM merupakan radio komunitas yang berbasis di Desa Balongbendo, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo. Paguyuban dipilih sebagai bentuk lembaga Pendowo FM, dengan demikian secara otomatis yang menjadi target utama adalah anggota paguyuban Pendowo. Sedangkan mayoritas anggota Pendowo ditilik dari status sosialnya 90% adalah kalangan menengah ke bawah. Sementara profesi yang dilakukan adalah 60% pedagang dan pengusaha home *industri*. Secara umum segmentasi yang dibidik oleh Pendowo FM adalah kalangan pelaku usaha kecil dan mikro yang perlu bantuan pengembangan untuk usaha. Bila dikelompokkan dalam strata pendidikan yang dibidik oleh Pendowo FM adalah kalangan berpendidikan menengah ke bawah. Sehingga dalam menyampaikan substansi isi siaran Pendowo FM selalu berpegang pada rumus menggunakan obat, penyesuaian dosis, dan ketepatan penyampaian.

Dengan segmentasi pendengar kalangan bawah dan berprofesi sebagai pelaku usaha kecil dan menengah, maka Pendowo FM memilih format siaran yang mengedepankan informasi dan pengetahuan yang bermanfaat melalui ceramah serta diskusi. Beberapa program unggulannya diantaranya Wawasan Kebangsaan bersama Emha Ainun Nadjib (Cak Nun) dari Pengajian Padhangmbulan, Bangbang Wetan dan Forum lain yang dipandu Cak Nun (*recorded*). Menurut Widodo Wawasan Kebangsaan diunggulkan karena ideologi non-kebangsaan saat ini mulai mempengaruhi warga Balongbendo, seperti ideologi agama Islam kanan yang dibawa oleh Hizbut Tahrir Indonesia (Wawancara 18 Januari 2017). HTI masuk dan mempengaruhi warga lewat ruang-ruang pertemuan warga, pengajian, khotbah Jumatan di Masjid, dan sebagainya. Pendowo FM punya kewajiban untuk menyebarluaskan pandangan Islam yang berorientasi pada ranah kebangsaan, oleh karenanya dimunculkan ide program Wawasan Kebangsaan tersebut. Masih menurut Widodo, Pendowo FM dalam memformat

siarannya memposisikan diri sebagai sarana pencerahan bagi masyarakat, mengupas berbagai permasalahan yang dapat memperkuat semangat kebangsaan dengan landasan nilai-nilai kemanusiaan dan sosial demi terangkatnya martabat bangsa.

V.2.e. Ruang Diskusi Pendowo FM

Sebagai bagian dari aktivitas Pendowo FM sebagai radio komunitas, ruang diskusi menjadi hal yang mutlak diperlukan. Ruang diskusi tersebut mewadahi para pendengar Pendowo FM yang ingin jumpa darat, serta berdiskusi mengenai hal-hal yang terjadi di sekitar khususnya di Desa Balongbendo dan Kecamatan Balongbendo. Widodo (wawancara 18 Januari 2017) mengungkapkan bahwa sejak tahun 2015 Pendowo FM menginisiasi pembukaan warung kopi di pelataran studio Pendowo FM. Warung kopi tersebut diberi nama De Brother Kafe yang menggabungkan konsep warung kopi dengan perpustakaan mini. Perpustakaan dihadirkan supaya pengunjung dapat menikmati kopi sekaligus membaca buku. Pengelolaan kafe tersebut dipercayakan kepada Kandar, orang muda yang sejak awal bergabung dengan Pendowo FM.

Produk yang disajikan oleh kafe ini terdiri dari 18 macam kopi nusantara, yang didatangkan langsung dari para petani kopi di daerah terutama di Sidoarjo dan sekitarnya. Hal ini menunjukkan bahwa Pendowo FM memiliki kepedulian untuk mengangkat potensi daerah, dalam hal ini kopi dan segala hasil bumi lainnya.

V.2.f. Pendowo Gugah Nusantara

Selain kafe De Brother, Pendowo FM juga menginisiasi pendirian lembaga sosial masyarakat Pendowo Gugah Nusantara. Menurut Widodo (wawancara 18 Januari 2017) Pendowo Gugah Nusantara merupakan lembaga sosial masyarakat yang secara khusus memberi perhatian kepada penerapan UU No. 6/2014 - selanjutnya disebut UU Desa – juga Sistem Informasi Desa (SID) baik desa-desa di kecamatan Balongbendo maupun desa lain yang berada di wilayah Jawa Timur. Dalam pelaksanaannya Pendowo Gugah Nusantara bekerja sama dengan aparat desa setempat, melatih dan memberikan pemahaman lebih lanjut kepada pimpinan dan staf mengenai UU Desa & SID.

Salah satu kegiatan yang pernah dilaksanakan Pendowo Gugah Nusantara ialah Pelatihan SID (Sistem Informasi Desa) dilaksanakan di Pendopo Kecamatan Mojowarno pada hari Selasa & Rabu 27-28 Oktober 2015. Sebagaimana ditulis di website resmi pemerintah

Kabupaten Jombang³, pelatihan tersebut yang diikuti oleh Sekdes/Staf Desa se Kecamatan Mojowarno. Pendowo Gugah Nusantara hadir sebagai narasumber/pendamping juga LSM Combine dari Yogyakarta. Pelatihan SID ini berfungsi untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik yang berbasis kebutuhan di tingkat lokal/desa, termasuk adanya ketersediaan data yang bisa dimanfaatkan di tingkat desa, membantu proses perencanaan desa sebagai kekayaan data dalam menyusun dokumen perencanaan desa, serta untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas pembangunan di tingkat desa.

Pelatihan-pelatihan serupa sudah dilaksanakan juga oleh Pendowo Gugah Nusantara di beberapa desa di sekitar Sidoarjo seperti di Magetan, Malang, Pasuruan, dan sebagainya. Adapun beberapa poin dari UU Desa yang secara khusus diberi perhatian oleh Pendowo Gugah Nusantara ialah:

Dana miliaran rupiah akan masuk ke kas Desa. Sebagaimana diketahui bahwa desa akan mendapatkan kucuran dana dari pemerintah pusat melalui APBN lebih kurang 1 miliar per tahun. Hal ini sesuai dengan ketentuan di UU Desa pasal 72 ayat (1) mengenai Sumber Pendapatan Desa. Dalam huruf 'd' disebutkan "Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota." Selanjutnya dalam ayat (4) pasal yang sama disebutkan, Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Penghasilan kepala desa. Menurut pasal 66 UU Desa, kepala desa atau yang disebut lain (nagari) memperoleh gaji dan penghasilan tetap setiap bulan. Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa bersumber dari dana perimbangan dalam APBN yang diterima oleh kabupaten/kota ditetapkan oleh APBD. Selain penghasilan tetap yang dimaksud, kepala desa dan perangkat desa juga memperoleh jaminan kesehatan dan penerimaan lainnya yang sah. Berbeda dengan ketentuan undang-undang sebelumnya, dimana dinyatakan bahwa gaji kepala desa menjadi tanggung jawab desa yang bersangkutan, maka dalam ketentuan yang baru gaji desa dipikirkan oleh APBD kabupaten/kota setempat.

Kewenangan kepala desa. Dalam UU Desa dinyatakan tentang pembagian kewenangan tambahan dari pemerintah daerah yang merupakan kewenangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu adanya peluang desa untuk mengatur penerimaan yang

³ <http://www.jombangkab.go.id/index.php/web/entry/5698-pelatihan-sistem-informasi-desa-bagi-sekdesstaf-desa-se-kecamatan-mojowarno-tahun-2015.html>

merupakan pendapatan desa yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 72 UU Desa. Bagi Pendowo Gugah Nusantara, hal ini harus dikontrol supaya kepala desa dapat bertugas dengan benar, proporsional, serta jauh dari peluang penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

Masa jabatan kepala desa bertambah. Masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun dan dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut (pasal 39). Demikian juga dengan masa jabatan Badan Permusyawaratan Desa, mereka bisa menjabat paling banyak tiga kali masa jabatan, baik secara berturut turut maupun tidak berturut-turut. Berbeda dengan peraturan perundangan sebelumnya, masa jabatan kali ini ditambah 1x yang memberi kesempatan kepala desa menyelesaikan program kerja yang dirancangnya.

Penguatan fungsi Badan Permusyawaratan Desa. Menurut pasal 55 UU Desa yang baru, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi; membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Sistem Informasi Desa (SID). Berbagai aturan mengenai Sistem Informasi Desa (SID) tertuang dalam Pasal 86 yang merujuk kepada Sistem Informasi Desa dan Pembangunan Kawasan. Isi pasal tersebut sebagai berikut:

- a. Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
- c. Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.
- d. Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
- e. Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan.
- f. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk Desa.

Dari uraian di atas dapat dilihat hal yang tidak bisa ditinggalkan adalah pentingnya sumber daya manusia sebagai bagian dari Sistem Informasi Desa menunjukkan kewajiban pada pihak Kabupaten/Kota untuk memberikan pendampingan dan penguatan atas tata kelola

informasi dan data pembangunan di tingkat desa. Aspek pendampingan inilah yang diisi oleh LSM Pendowo Gugah Nusantara, mengingat tidak banyak organisasi non-pemerintah yang menguasai substansi maupun teknis Sistem Informasi Desa (SID). Jadi Pendowo FM menjadi penggagas di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya dalam soal optimalisasi Sistem Informasi Desa (SID) untuk kemajuan pembangunan desa.

V.2.h. Pengawasan Pembangunan Pendowo FM – Dana Desa Balongbendo

Dana Desa (DD) adalah dana yang dikucurkan dari pemerintah pusat kepada desa agar digunakan untuk percepatan pembangunan desa dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya UU No. 6 Tahun 2014 desa mendapat kucuran anggaran yang berlimpah bila dibandingkan sebelum adanya undang-undang desa diberlakukan, disamping DD masih ada lagi Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak (BHP), Bagi Hasil Retribusi (BHR) dan Bantuan Keuangan Daerah maupun Propinsi. Pendowo FM sebagaimana diungkapkan oleh Widodo (wawancara 18 Januari 2017) menyatakan bahwa banyaknya dana yang dikelola oleh pemerintah desa akhirnya mendorong pengelolaan yang akuntabilitas dan transparan. Tentunya ini memerlukan beberapa prasyarat utama yaitu kemauan pemerintah desa untuk mengelola keuangan desa dengan baik juga kapasitas aparatur pemerintah desa yang mempunyai kecakapan yang layak.

Dalam tatakelola desa kemauan setiap aparatur untuk mengelola keuangan dengan baik dan transparan menjadi syarat utama. Jika aparatur desa masih mempunyai kekurangan kemampuan bisa meng-*'upgrade'* diri dengan mengikuti berbagai pelatihan yang diadakan Pemerintah tingkat di atasnya atau Pelatihan aparatur desa yang dilakukan desa secara mandiri.

Ada persoalan yang hampir umum terjadi di setiap daerah, yaitu, dengan adanya keuangan desa yang besar menimbulkan kecurigaan berbagai pihak bahwa keuangan desa tidak digunakan sebagaimana mestinya. Sehingga, kecurigaan tersebut menjadi isu utama di kalangan masyarakat desa yang potensial menimbulkan gejolak sosial di desa.

Dengan banyaknya berita maupun iklan layanan masyarakat yang menyampaikan bahwa desa sudah memperoleh anggaran dana berbagai sumber membuat warga paham berapa anggaran yang dikelola desa. Tentunya dengan dana besar yang diterima desa sudah banyak hal yang dilakukan oleh Pemdes. Namun, kadang dengan perencanaan yang kurang matang pembangunan yang dilakukan oleh pemdes kurang dirasakan oleh masyarakat.

Semestinya pelibatan masyarakat dalam pembangunan desa menjadi sesuatu yang harus dilakukan oleh desa yang bisa disebut dengan istilah *'Pembangunan Partisipatif'*. Hal ini untuk mengeliminasi kecurigaan berbagai pihak bahwa tidak ada penyelewengan dan anggaran

desa digunakan semestinya. Warga bisa bersama-sama Pemdes melakukan pengawasan. Dalam tatakelola yang baik bisa juga kerja Pemdes didukung aplikasi yang disediakan pemerintah maupun lembaga lain yang menyediakan aplikasi Non berbayar seperti SID dari Combine Yogyakarta atau Siskeudes yang di release oleh BPKP.

Model pembangunan partisipatif inilah yang bisa menanggulangi kecurigaan berbagai pihak komponen masyarakat yang ada di desa. Yang menjadi persoalan adalah apabila warga tidak merasakan perubahan yang signifikan akibat pembangunan desa. Hal ini akan menimbulkan pertanyaan, mengapa anggaran desa yang besar tersebut tidak bisa dirasakan hasilnya oleh warga. Bila isu ini dikelola oleh pihak yang berseberangan dengan Pemdes akan menjadi pemicu gejolak sosial di desa.

Solusi berbagai hal tersebut adalah tatakelola desa yang baik, transparan dan melibatkan partisipatif warga dalam melakukan pembangunan desa. Kemudian, jangan melupakan bahwa desa sebagai entitas pemerintahan yang masih memegang azas asal-usul dan adat istiadat yang sudah turun temurun dari generasi ke generasi. Desa jangan merubah dirinya menjadi kota, meskipun suasana sudah seperti kota, tetaplah berjalan sebagai desa dengan adat istiadat dan budayanya.

V.2.i. Partisipasi Pendowo FM Dalam Program KOTAKU

Program KOTAKU merupakan salah satu upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum – Perumahan Rakyat dalam percepatan penanganan permukiman kumuh dan mendukung “Gerakan 100-0-100”, yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. KOTAKU akan menangani kumuh dengan membangun *platform* kolaborasi melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan peran masyarakat berbasis komunitas.

Sebagai implementasi percepatan penanganan kumuh, KOTAKU akan melakukan peningkatan kualitas, pengelolaan serta pencegahan timbulnya permukiman kumuh baru, dengan kegiatan-kegiatan pada entitas desa/kelurahan, kawasan dan kabupaten/kota. Kegiatan penanganan kumuh ini meliputi pembangunan infrastruktur serta pendampingan sosial dan ekonomi untuk keberlanjutan penghidupan masyarakat yang lebih baik di lokasi permukiman kumuh.

Tahapan pelaksanaan KOTAKU meliputi tahapan pendataan, dimana lembaga masyarakat di desa/kelurahan yang bernama Badan/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM), sudah melakukan pendataan kondisi awal (*baseline*) 7 indikator kumuh di desa/kelurahan masing-masing. Setelah itu, disusun dokumen perencanaan yang terintegrasi

antara dokumen perencanaan masyarakat dengan dokumen perencanaan kabupaten/kota. Hasil perencanaan ini menentukan kegiatan prioritas untuk mengurangi permukiman kumuh dan mencegah timbulnya permukiman kumuh baru, yang akan dilaksanakan, baik oleh masyarakat atau oleh pihak lain yang memiliki keahlian dalam pembangunan infrastruktur pada entitas kawasan dan kota.

Monitoring dan evaluasi akan dilakukan secara berkala guna memastikan ketepatan kualitas dan sasaran kegiatan, sehingga dapat membantu percepatan penanganan permukiman kumuh. Kegiatan-kegiatan pengembangan kapasitas untuk pemerintah daerah dan masyarakat akan dilakukan bersama tahapan kegiatan. Termasuk mendorong perubahan perilaku dalam pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana dasar permukiman.

Beberapa hal yang dilakukan oleh Pendowo FM dalam rangka mendukung pelaksanaan program KOTAKU, khususnya di wilayah Kecamatan Balongbendo, sebagai berikut:

- Menerbitkan buletin sosialisasi “KOTAKU Warta Balongbendo” bekerja sama dengan Forum Komunikasi Antar Badan Keswadayaan Masyarakat (FKA BKM) Kecamatan Balongbendo. Buletin berisi informasi seputar pelaksanaan Program KOTAKU khususnya di Kecamatan Balongbendo, dengan berbagai macam rubrik diantaranya Liputan Utama, Geliat KOTAKU, serta Kilas KOTAKU. Penerbitan buletin ini dilakukan sejak tahun 2015, dan kini sudah mencapai terbitan Edisi ke-IV Tahun ke-3.
- Melaksanakan kegiatan pembekalan bagi relawan KOTAKU di Kecamatan Balongbendo, bekerja sama dengan Forum Komunikasi Antar Badan Keswadayaan Masyarakat (FKA BKM) Kecamatan Balongbendo. Adapun materi pembekalan ialah pelatihan operasional dan pelatihan komputer. Tercatat kegiatan pembekalan baru satu kali diadakan yakni pada tanggal 9-10 Desember 2016 bertempat di Balai Desa Seduri Kecamatan Balongbendo.
- Pendampingan terhadap relawan perempuan KOTAKU yang bernaung di bawah organisasi “Srikandi 101” Kecamatan Balongbendo. Pendampingan yang dilakukan berupa pelatihan operasional dan komputer, serta pemberian materi mengenai prinsip pelaksanaan pembangunan tanpa kumuh sebagaimana dirumuskan dalam KOTAKU.

BAB. VI. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari penelitian yang dilakukan terhadap Speaker Kampung & Pendowo FM, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: bahwa media komunitas mendorong munculnya model pembangunan partisipatif, model pembangunan inilah yang bisa menanggulangi kecurigaan berbagai pihak komponen masyarakat yang ada di desa. Yang menjadi persoalan adalah apabila warga tidak merasakan perubahan yang signifikan akibat pembangunan desa. Hal ini akan menimbulkan pertanyaan, mengapa anggaran desa yang besar tersebut tidak bisa dirasakan hasilnya oleh warga. Bila isu ini dikelola oleh pihak yang berseberangan dengan Pemdes akan menjadi pemicu gejolak sosial di desa.

Solusi berbagai hal tersebut adalah tatakelola desa yang baik, transparan dan melibatkan partisipatif warga dalam melakukan pembangunan desa. Kemudian, jangan melupakan bahwa desa sebagai entitas pemerintahan yang masih memegang azas asal-usul dan adat istiadat yang sudah turun temurun dari generasi ke generasi. Desa jangan merubah dirinya menjadi kota, meskipun suasana sudah seperti kota, tetaplah berjalan sebagai desa dengan adat istiadat dan budayanya.

BAB. VII. RENCANA TINDAK LANJUT DAN PENGELOLAAN OUTCOME

Penelitian ini merupakan penelitian yang akan menghasilkan materi tulisan yang akan dikembangkan menjadi artikel di jurnal internasional. Oleh karena itu di bab ini akan dijelaskan gambaran materi tulisan tersebut, sebagaimana terlampir di dalam laporan penelitian ini:

Pertama, penelitian telah memberikan perspektif pengetahuan bahwa media komunitas (Speaker Kampung & Pendowo FM) berhasil merepresentasi kepentingan warga di dalam menyalurkan kepentingannya terkait jalannya pembangunan di daerah (dalam hal ini di tingkat desa/kecamatan setempat).

Kedua, penelitian membuktikan bahwa media komunitas mengembangkan medium penyampaian pesannya, tidak hanya melalui media primer yakni radio tetapi mulai merambah media-media berbasis internet termasuk salah satunya Sistem Informasi Desa (SID), sebagaimana terjadi dan telah dituliskan dalam laporan ini mengenai kiprah Pendowo FM.

Ketiga, penelitian ini membuktikan bahwa antara warga dan aparat desa bisa bersinergi untuk membangun wilayahnya. Media komunitas di sini memainkan peran sebagai jembatan komunikasi, yang memberikan ruang bagi warga untuk menjalin relasi dengan pemerintah

daerah, dalam semangat egalitarianisme mereka beraktivitas bersama untuk kemajuan daerahnya.

Keempat, penelitian ini menemukan bahwa media komunitas aktif membangun jaringan dengan elemen masyarakat sipil lainnya untuk mengontrol jalannya pembangunan, termasuk pers, kampus, dan organisasi non-pemerintah lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Biocca, F. (1988). *Opposing conceptions of the audience: the active and passive hemispheres of communication theory*. In J. A. Anderson (Ed.), *Communication Yearbook 11* (pp. 51-80). New York: Routledge.
- Creeber, Glen & Martin, Royston, 2009, *Digital Cultures: Understanding New Media*, London: McGraw-Hill Open University Press.
- Denzin, Norman K & Lincoln, Yvonna, 1994, *Handbook of Qualitative Research*, New York: Sage Publications.
- Goodspeed, R, 2015, 'Smart Cities: Moving Beyond Urban Cybernetics to Tackle Wicked Problems', *Revue Economique et Sociale*, vol. 8, no. 1, hh. 79-92.
- Hague, Barry N. & Brian D.Loader, 1999, *Digital Democracy: Discourse and The Decision Making in The Information Age*, New York: Routledge.
- Jahja, Ranggoaini, Haryana, Mariana, Dina, Rendra, Meldi, 2012, *Sistem Informasi Desa: Sistem Informasi Desa dan Data untuk Pembaruan Desa*, Yogyakarta: Combine Resources Institutions.
- Kampung Media, 29/3/2014. "Tantangan Media Komunitas Ditengah Program Pemerintah". Diakses pada tanggal 25 Maret 2017 dari <http://pelayanan-publik.kampung-media.com/2014/03/29/tantangan-media-komunitas-ditengah-program-pemerintah-1966>
- Lievrouw, Leah A. & Sonia Livingstone, 2006, *Handbook of New Media: Social Shaping and Social Consequences of ICTs*, London: Sage Publications.
- Lievrouw, Leah A., 2011, *Alternative and Activist New Media; Digital Media and Society Series*: Cambridge: Polity Press.
- Littlejohn, S. W., & Gray, R. (2001). *Theories of Human Communication (7th ed.)*. Belmont: Wadsworth Publishing Company
- Lukito, Penny Kusumastuti, 2014, *Membumikan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik: Tantangan Berdemokrasi ke Depan*, Jakarta: Penerbit Grasindo.
- Nuswantoro, Ranggabumi, 2016, 'Keseimbangan Informasi', *Harian Bernas Jogja*, 20 Desember, h. 5.
- Pawito, 2007, 'Media Komunitas dan Media Literacy', *Jurnal Ilmu Komunikasi*, vol. 4, no. 2, hh. 167-177.

- Portal Desa Ketangga, tanpa tanggal. Diakses pada tanggal 20 Maret 2017 dari <http://ketanggalomboktimur.desa.kemendesa.go.id/pages/detail/58-penduduk-dan-tenaga-kerja>
- Radar Lombok, 28/7/2016. “Kasus Pernikahan Dini di Lotim Masih Tinggi.” Diakses pada tanggal 29 Maret 2017 dari <http://www.radarlombok.co.id/kasus-pernikahan-dini-lotim-masih-tinggi.html#>
- Rennie, Ellie, 2006, *Community Media: A Global Introduction*, Maryland: Rowman & Littlefield Publishers. Inc.
- Rogers, Everett M., 1986, *Communication Technology: The New Media in Society*, New York: The Free Press.
- Speakerkampung.blogspot, 16/5/2016. “LPA Lotim Dukung Gerakan Anak Dalam Antisipasi Kejahatan”. Diakses pada tanggal 1 Februari 2017 dari <http://speakerkampung.blogspot.co.id/2016/05/lpa-lotim-dukung-gerakan-anak-dalam.html#more>
- Speakerkampung.net, 24/3/2017. “Somasi NTB, Kuatkan Pengetahuan Warga Untuk Mendapatkan Pelayanan.” Diakses pada tanggal 2 April 2017 dari <http://speakerkampung.net/somasi-ntb-kuatkan-pengetahuan-warga-mendapatkan-pelayanan/>
- West, R., & Turner, L. H. (2009). *Pengantar Teori Komunikasi: Analisis dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Winston, David, 2003, Digital Democracy and the New Age of Reason dalam *Democracy and New Media*, Henry Jenkins dan David Thorburn (Eds), Cambridge: The MIT Press.

TELAAH FUNGSI DAN KONTROL MEDIA KOMUNITAS TERHADAP PEMBANGUNAN DI TENGAH ARUS MEDIA BARU: STUDI PADA MEDIA KOMUNITAS SPEAKER KAMPUNG (LOMBOK TIMUR, NUSA TENGGARA BARAT) & PENDOWO FM (SIDOARJO, JAWA TIMUR)

Drs. Mario Antonius Birowo, M.A., Ph.D.

Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
mbirowo@yahoo.com

Ranggabumi Nuswantoro, M.A.

Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
ranggabumi_nuswantoro@mail.uajy.ac.id

Abstract

Fair development requires participation and involvement of citizens in it, especially in making decisions about what and how development is done. Citizens are entitled to know the direction and purpose of development, how the process, who is involved, what budget is needed, including transparency of budget usage. This study looks at the initial conditions of interest, namely what and how people are involved in development. Research done in Speaker Kampung and Pendowo FM are two of the many community media that exist in Indonesia. Kampung Speaker is located at Jalan Wisata Lemor, Dusun Montong gedeng, Ketangga Village, Suela District. East Lombok Regency, NTB, while Pendowo FM on Jl Gajah Mada 336 RT 10 / RW 04, Semawut Village, Balongbendo Village, Balongbendo Sub-district, Sidoarjo Regency, East Java.

Keywords: media, community, internet, democracy, development

1. PENDAHULUAN

Pembangunan yang berkeadilan mensyaratkan partisipasi dan keterlibatan warga di dalamnya, terutama dalam pengambilan keputusan soal apa dan bagaimana pembangunan itu dilakukan. Warga berhak tahu arah dan tujuan pembangunan, bagaimana prosesnya, siapa saja yang terlibat, berapa anggaran yang dibutuhkan, termasuk transparansi penggunaan anggarannya. Penelitian ini melihat kondisi awal yang menarik, yakni soal apa dan bagaimana warga terlibat di dalam pembangunan, terutama di dua media komunitas yakni Speaker Kampung & Pendowo FM.

Speaker Kampung dan Pendowo FM merupakan dua diantara sekian banyak media komunitas yang ada di Indonesia. Speaker Kampung beralamat di Jalan Wisata Lemor, Dusun Montong gedeng, Desa Ketangga, Kecamatan Suela. Kabupaten Lombok timur, NTB, sementara Pendowo FM di Jl Gajah Mada 336 RT 10/RW 04, Dusun Semawut, Desa Balongbendo, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Keduanya memiliki persamaan yakni menggunakan mulai menggunakan internet untuk mengoptimalkan kegiatan bermediana. Penelitian ini akan melihat beberapa hal yakni: 1) bagaimana warga berproses mendirikan Speaker Kampung dan Pendowo FM sebagai media komunitas, serta mulai menggunakan internet, 2) sejauh mana Speaker Kampung dan Pendowo FM berperan dalam mengontrol pembangunan di daerah, terutama supaya pembangunan juga memberdayakan potensi-potensi lokal daerah? 3) Bagaimana Speaker Kampung dan Pendowo FM mendorong dinamika Sistem Informasi Desa setempat?

2. KAJIAN LITERATUR

2.1. Media Komunitas & Pembangunan

Pustaka mengenai media komunitas bersifat cair dan tidak bernarasi tunggal. Walau demikian terdapat beberapa konsep media komunitas dari berbagai ahli yang bisa dijadikan rujukan, termasuk bagaimana posisi media komunitas terhadap pembangunan. Salah satunya dari Asosiasi penelitian media dan komunitas internasional (*International Association of Media and Communication Research* [IAMCR]). IAMCR memberi ciri bahwa media komunitas berasal, bersirkulasi dan beresonansi dalam masyarakat sipil, yakni ruang media komunikasi yang eksis di luar negara dan pasar (kerap kali independen dan nonprofit), meskipun tak menutup kemungkinan bagi media komunitas untuk berinteraksi dengan keduanya (IAMCR, dikutip dari Rennie 2006: 4).

Rennie juga mendefinisikan media komunitas dalam konteks masyarakat sipil. Media komunitas harus dilihat sebagai alat untuk mengelola maupun mengembangkan masyarakat sipil oleh masyarakat sipil itu sendiri. Masyarakat sipil adalah entitas yang terpisah dari negara, meskipun dalam banyak hal entitas ini perlu berhubungan dengan negara agar tetap eksis. Hubungan dengan negara ini pun berlaku bagi media komunitas, yang sekaligus membedakan posisi media komunitas dengan jenis media lain, misalnya *zine* maupun bentuk media lain yang bisa eksis tanpa perlu mengkhawatirkan regulasi media (oleh negara).

Penegasan posisi media komunitas dengan negara juga ditunjukkan dari konsep yang dikemukakan oleh Combine Resources Institution (CRI). CRI sendiri selama ini tidak memiliki definisi ketat dalam menyebut komunitas. Dalam konsep CRI, media komunitas bisa muncul dalam ruang geografis tertentu (misalnya desa, dusun, kampung, dsb.) maupun di komunitas yang memiliki kesamaan kepentingan. Secara implisit, CRI selama ini mendorong perkembangan media komunitas bagi warga negara yang termarjinalkan, utamanya oleh kebijakan negara. Oleh karena itu, CRI mengamini bahwa media komunitas adalah media perlu ada sebagai ruang yang steril dari *negara* dan *pasar*, meskipun dalam ruang itu media komunitas tetap bisa berhubungan dengan keduanya.

Walau terkesan berjarak dengan negara namun sejatinya media komunitas menjadi bagian dari negara itu sendiri. Sebab anggota media komunitas merupakan warga negara yang tinggal dan menghidupi wilayahnya, termasuk memberikan sumbangan pemikiran maupun kritik terhadap proses pembangunan. Mengenai relasi antara media komunitas dengan pembangunan, terdapat konsep yang dikemukakan oleh Pawito sebagai berikut: media komunitas (*community media*) merupakan jenis media (cetak maupun elektronik) yang hadir di dalam lingkungan masyarakat atau komunitas tertentu dan dikelola oleh dan diperuntukkan bagi warga komunitas tertentu. Karakter utama dari media komunitas dengan demikian adalah (a) memiliki jangkauan terbatas (lokal), (b) menampilkan isi yang bersifat kontekstual mengacu kondisi komunitas, (c) pengelola serta target adalah orang-orang dari komunitas yang sama, dan (d) hadir dengan misi melayani - tidak ada orientasi mencari keuntungan modal (Pawito, 2007). Dari pengertian tersebut bisa ditekankan bahwa lokalitas menjadi ciri utama dari media komunitas. Lokalitas tersebut terwujud dalam segala aspek yang muncul dari media komunitas, mulai dari *content*, redaksional, hingga operasional. Sifatnya yang nonprofit membuat media komunitas lebih leluasa bergerak melayani kepentingan warga, tanpa risau diintervensi oleh kepentingan pemodal.

Dalam konteks pembangunan daerah, berkenaan apa media komunitas terutama memiliki signifikansi, maka upaya pemberdayaan dan aktualisasi potensi-potensi lokal menjadi hal yang sangat utama. Pembangunan daerah dengan demikian tidak harus diartikan sebagai kemandirian masyarakat suatu daerah (atau para warga suatu komunitas) – dalam arti tidak memiliki ketergantungan dengan daerah lain (atau dengan para warga komunitas lain) tetapi yang lebih penting adalah apresiasi dan optimalisasi pemanfaatan potensi dan produk-produk lokal (daerah) demi lebih tercukupinya kebutuhan warga daerah. Pembangunan daerah dengan demikian diharapkan dapat memperkokoh nilai-nilai budaya lokal (daerah) yang selanjutnya juga dapat memperkokoh nilai-nilai dan identitas budaya bangsa (Pawito, 2007).

2.2. Media Baru

Terdapat banyak teori, konsep, dan pemikiran mengenai media baru. Menurut Leah A. Lievrouw & Sonia Livingstone (2011: 7) definisi media baru adalah sebagai berikut:

“To begin with, we define new media as information and communication technologies and their social contexts, which include three main components:

- (1) the material artifacts or devices that enable and extend people’s abilities to communicate and share meaning;*
- (2) the communication activities or practice that people engage in as they develop and use those devices; and*
- (3) the larger social arrangements organizational forms that people create and build around artifacts and practices.”*

Dalam pemikiran Lievrouw & Livingstone, kekhasan media baru nampak dalam tiga hal yakni soal materi, praktek komunikasi, dan pengorganisasian sosial. Dimulai dari materi baru lalu muncullah ruang baru yang membuat proses berinteraksi dan berkomunikasi jadi lebih mudah. Selanjutnya muncul pengorganisasian yang membuat proses tersebut menjadi terstruktur dan sistemik. Selanjutnya muncullah organisasi, kelompok, atau grup berbasis media baru.

Ahli lain yakni Glen Creeber dan Royston Martin memiliki pendapat berbeda. Creeber dan Martin (2009: 2) merujuk pada ensiklopedi gratis berbasis internet, Wikipedia (yang merupakan produk dari media baru) mendefinisikan media baru sebagai produk teknologi komunikasi yang hadir bersama-sama dengan komputer digital. Sebelum tahun 1980-an media diandalkan terutama pada cetak dan model analog seperti koran, televisi, bioskop, dan radio. Sekarang dunia memiliki radio digital, televisi dan bioskop, sementara bahkan mesin cetak telah diubah oleh teknologi digital yang baru seperti perangkat lunak manipulasi gambar seperti Adobe Photoshop dan alat-alat *desktop publishing*. Beberapa teknologi yang masuk kategori media baru adalah Internet dan World Wide Web, televisi digital, film digital, *Personal Computer* (PC), DVD (Digital Versatile Disc atau Digital Video Disc), CD (Compact Disc), media portabel players (seperti MP3 Player), ponsel (atau cell) phones, video (atau komputer) game, *Virtual Reality* (VR), *Artificial Intelligence* (AI).

Dalam perspektif Creeber dan Martin media baru mungkin bukan istilah yang ideal untuk menyebut teknologi komunikasi baru. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa kebaruan menjadi unsur pokok dalam transformasi teknologi komunikasi tersebut. Terdapat beberapa perbedaan utama antara media analog dan media baru. *Pertama*, media baru melampaui teknologi analog dalam kemudahan dipindahtangankan satu platform ke platform media lainnya. Data dapat disimpan dan diakses dari jarak jauh dan didistribusikan. *Kedua*, data digital juga lebih mudah untuk dikreasi dan hasil akhirnya dapat direproduksi tanpa batas dan kehilangan kualitas di dalam media baru. Singkatnya, bahan digital melebihi sistem analog dalam hal kecepatan, kualitas, dan kinerja.

Media digital atau media baru tidak hanya memunculkan fisik teknologi informasi dan komunikasi yang baru, namun juga cara berpikir baru. Beberapa ahli menyebut kebaruan ini sebagai revolusi digital, kebaruan digital yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Creeber dan Martin memberi catatan bahwa revolusi digital adalah istilah yang baru-baru ini dipakai untuk menggambarkan efek dari penurunan biaya dan ekspansi dari perangkat digital seperti komputer dan telekomunikasi. Dengan kedatangan media digital, dunia ini bisa dibilang berubah begitu pula dengan cara kita berpikir tentang diri kita sendiri dan planet ini (memang alam semesta). Secara khusus, budaya digital dikaitkan dengan percepatan perubahan sosial.

2.3. Demokrasi Digital

Era digital ditandai dengan kemunculan internet. Teknologi digital berubah secara fundamental dari komputasi untuk komunikasi. Transformasi ini mencapai masa kritis di awal tahun 1990-an ketika internet menjadi sarana komunikasi yang dapat diandalkan di antara individu. Hal ini memungkinkan orang membuat konten yang lebih baik dan lebih kaya dengan menggabungkan kata-kata tertulis dengan suara dan video. Jika biasanya pesan dikonversi dalam bentuk tertulis, suara, atau audiovisual, maka internet memungkinkan orang merangkai pesan dari ketiga unsur yang ada. Sebagaimana dinyatakan oleh David Winston (2003):

“This gave people the ability to create better and richer content by combining the written word with voice and video. Additionally, content became data and could be searched for important bits of information. Suddenly, millions of documents were searchable instead of having to look up indexes in books or review video or audiotapes.”

Orang kini mencari data tidak lagi dalam bentuk indeks di buku, atau review kaset audio maupun video, melainkan dalam bentuk digital yang dengan mudah diketikkan di website pencari data seperti Google atau Yahoo.

Dalam kaitannya dengan politik dan demokrasi, menurut Winston setidaknya terdapat empat hal yang membedakan dunia digital dengan dunia lama (2003: 135-136):

Pertama, dalam hal ini *age of reason* baru. Komunikasi digital akan memberdayakan individu dengan mengorbankan elit, artinya proses penyampaian informasi politik lebih independen dan tidak tergantung kekuasaan elit (yang mungkin menguasai media).

Kedua, media komunikasi baru ini akan bergerak dengan kecepatan yang hampir tidak bisa dipahami. Tenggat waktu menjadi tidak relevan lagi atau dalam kenyataannya, tidak ada. Permintaan akan berita *real time* meningkat drastis. Media-media konvensional mulai bergerak mendekati digital, atau setidaknya bermain di dua kaki yakni mempertahankan bentuk konvensionalnya (*print media* atau *broadcast media*) namun masuk ranah digital lewat internet (*website, social media, live streaming*, dan sebagainya).

Ketiga, dengan meningkatnya kecepatan komunikasi, maka warga di dunia digital akan menuntut informasi politik yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka, baik sisi teknis (medianya) maupun substansinya, untuk menentukan langkah dalam suatu pemilihan umum. Kenyamanan individu akan menjadi bagian integral percakapan politik di masa depan.

Keempat, masyarakat akan mengalami ledakan informasi politik. Mulai dari informasi yang dibagikan oleh media konvensional hingga media digital. Jika tidak dikelola maka ledakan informasi ini akan menjadi kontraproduktif bagi pengembangan demokrasi di masa depan.

Keempat kebaruan politik dan demokrasi dalam konteks dunia digital di atas membuktikan pernyataan Franklin Roosevelt bahwa "Demokrasi bukanlah hal yang statis." Dunia digital akan membawa politik dan demokrasi lebih dinamis, sebab dunia digital memberi kesempatan kepada orang-orang untuk menyampaikan dan mendiskusikan ide-idenya. Individu tidak lagi bergantung kepada elit. Demokrasi akan semakin kuat sebab basisnya adalah individu yang memiliki kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri.

Pemikiran Winston di atas nampaknya sejalan dengan Barry N. Hague dan Brian D. Loader (1999: 4), ilmuwan komunikasi politik dari Universitas Tescide Inggris, mengenai perubahan paradigma demokrasi di era digital. Lembaga-lembaga politik saat ini berada dalam kondisi lemah dan performanya buruk. Ditandai dengan semakin banyaknya aktor-aktor politik yang melakukan tindakan-tindakan yang merugikan publik: korupsi, kolusi, suap, dan skandal kekuasaan. Munculnya era digital atau era informasi, memberikan kesempatan untuk memikirkan kembali dan, jika perlu, secara radikal merombak atau mengganti mereka yakni lembaga-lembaga politik, termasuk aktornya, yang tidak kredibel dan berkualitas. Era ini mengakhiri era perwakilan demokrasi di abad ke-20.

3. METODE PENELITIAN

Dilihat dari isu yang akan dijawab yakni telaah fungsi dan peran media komunitas terhadap pembangunan, maka penelitian ini digolongkan penelitian kualitatif, dengan paradigma konstruktivis dan strategi penelitian *participant observation* (Hamilton dalam Denzin & Lincoln 1994: 63). Metode penelitian di sini menjadi pegangan operasional untuk mencari dan menganalisis data, khususnya data yang berkaitan dengan topik yang diusulkan. Dalam penelitian ini data dispesifikkan berupa dokumen dari media komunitas, dokumen administrasi warga/komunitas, peralatan media komunitas, isu-isu komunitas, dan sebagainya.

Sebagaimana dirancang oleh Denzin & Lincoln (1994: 14-15), penelitian kualitatif berparadigma konstruktivis menggunakan data/temuan lapangan sebagai alat/bahan untuk membangun teori/konsep. Maka urutan pengambilan datanya sebagai berikut:

7. Studi literatur

Mempelajari dokumen terkait media komunitas yang menjadi objek penelitian, juga data administrasi masyarakat/komunitas yang dituju. Mengidentifikasi dengan lebih detail kebutuhan data untuk penelitian

8. Observasi

Melakukan pengamatan terhadap objek penelitian, menggali data dari sumber-sumber primer terutama identifikasi isu dan permasalahan seputar topik penelitian. Selain itu juga melihat fasilitas (fisik) media komunitas

9. FGD

Diskusi terbuka berdasarkan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya (pengolahan saat proses studi literatur dan observasi). FGD menjadi ruang bagi peneliti untuk menajamkan isu yang muncul berdasarkan pengalaman personal objek yang diteliti.

10. Indepth interview

Memilih person-person dalam komunitas yang dianggap memiliki informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, menemui dan menanyai lebih lanjut. Daftar pertanyaan disiapkan sebelumnya dari hasil pengolahan FGD.

11. Interpretasi data

12. Data yang dianggap cukup oleh peneliti kemudian diinterpretasi menggunakan teori/konsep yang sebelumnya telah ditetapkan di proposal. Namun dimungkinkan peneliti menumculkan pemikiran baru yang dikembangkan dari proses penelitian yang telah berjalan sebelumnya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Speaker Kampung

4.1.1. Kemandirian

Speaker Kampung menjalankan kegiatannya berdasar pada kemandirian. Mereka menjalankan suatu usaha untuk membiayai operasional media komunitasnya. Eros menceritakan saat mereka membuat Buletin Speaker Kampung, mereka mengadakan usaha studio foto. “Saya buat studio, kita di buletin setiap perbulan diterbitkan, dari dananya itu kita bisa buat buletin itu dengan berapa kali cetak printer”. Melalui kreatifitasnya, mereka berusaha menangkap berbagai peluang di sekitar mereka. Berbagai acara yang dilayani dengan jasa foto antara lain: wisuda taman kanak-kanak, pembuatan kartu tanda penduduk. Hasil dari jasa tersebut digunakan untuk membiayai pencetakan dan operasional buletin Speaker Kampung. Setiap terbit, Speaker Kampung dicetak 30-50 eksemplar yang dibagikan ke berbagai tempat (wawancara dengan Eros, 17 Januari 2017).

Kemandirian ini sampai sekarang tetap dilakukan dalam pengelolaan Speaker Kampung. Setiap ada kegiatan yang mendatangkan pemasukan sebagian digunakan untuk pembiayaan. Soal pembiayaan ini, ada rencana aktivis Speaker Kampung untuk beternak agar memperoleh pemasukan yang rutin.

4.1.2. Partisipasi dalam Pengawasan Pembangunan

Warga harus mendapat informasi tentang apa yang dilakukan pemerintah yang terkait dengan kepentingan warga. Transparansi merupakan syarat utama untuk mengontrol proses pembangunan terhindar dari praktek korupsi dan salah urus. Untuk menjamin informasi bisa mengalir ke warga dan aspirasi warga bisa didengar pemerintah, maka aktivis Speaker Kampung melihat bahwa warga harus melakukan tindakan aktif, yang antara lain dengan memanfaatkan media komunitas. Dalam bagian ini, peneliti akan menguraikan kiprah Speaker Kampung dalam mendorong transparansi di wilayahnya.

Beberapa isu yang mejadi perhatian mereka adalah pembangunan fisik berupa sekolah, jalan, kesehatan, pernikahan dini, pemilihan kepala desa, pelestarian budaya Sasak, lingkungan hutan, pengawasan proyek pembangunan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri). Liputan soal PNPM Mandiri pernah membuat Eros dilaporkan ke pihak berwenang. Peristiwa tersebut bermula dari tulisan Eros tentang pengelolaan PNPM di tahun 2010 yang diunggah ke web Rumah Alir, sebuah web yang ditujukan bagi sistem informasi komunikasi Kongres Sunda Kecil (Bali, NTT, NTB, Maluku dan Maluku Utara). Melalui tulisannya, Eros bermaksud untuk mendorong keterbukaan informasi. Tulisan tersebut baru diperkarakan pada tahun 2012, dan diancam akan dilaporkan ke polisi. Tulisan Eros dianggap membunuh karakter pengurus PNPM. Selain itu, tulisan tersebut dianggap dapat menghambat pembangunan karena dana PNPM untuk desa Ketangga bisa tidak dicairkan.

Eros kemudian dipanggil oleh Forum Komunikasi PNPM, pemerintah desa, kecamatan dan kabupaten. Kasus ini cukup membuat shock yang bersangkutan, walau Eros sendiri berusaha tenang karena ia merasa benar sesuai hukum. Apalagi ia merasa sudah menjalankan prinsip jurnalistik yang seimbang, dengan mencari informasi dari berbagai sumber saat menulis artikel tersebut. Ketika menghadapi kasus ini, Eros merasa pengetahuan hukum yang dimilikinya (ia seorang sarjana hukum) serta penggunaan prinsip jurnalistik sangat membantunya.

Untuk mendukung posisinya, Eros sempat berkomunikasi dengan Muhammad Syairi, salah seorang aktivis radio komunitas Primadona FM, desa Karang Bajo, Lombok Utara. Syairi memberi semangat kepadanya untuk yakin atas langkah yang sudah dilakukannya. Menurut Syairi, yang penting sudah melakukan konfirmasi. Saat itu radio komunitas masih berjalan. Pada tahun 2014, radio komunitas Ninanta FM melakukan liputan terhadap pelaksanaan PNPM Mandiri, walau nampaknya tidak terlalu ditanggapi pengurus PNPM Mandiri, misalnya tidak hadir pada undangan talkshow di radio tersebut karena suatu hal.

”Seperti acara talk show di radio kami sering mengundang pelaku PNPM, namun sering tidak menghadirinya” Jelas Ingkong saat dikonfirmasi 26/3/2014 (Kampung Media, 29/3/2014).

Namun untuk memenuhi akses terhadap informasi, relawan radio melakukan wawancara langsung dengan pengurusnya. Menurut Eros, liputan tersebut membawa dampak terhadap pengelolaan PNPM. Pihak desa ikut mencermati PNPM, karena sebelumnya pihak desa tidak pernah ikut campur tangan (wawancara dengan Eros, 18 Januari 2017).

Dampak dari liputan jurnalisme warga bisa dilihat dari desakan untuk memperbaiki fasilitas jalan di Bilakembar. Bilakembar merupakan bagian dari desa Suela, satu kecamatan Suela dengan Desa

Ketangga. Sebelum tahun 2015, jalan menuju Bilakembar dalam kondisi buruk sehingga mobilitas warga terhambat. Melihat kondisi yang demikian, Speaker Kampung melakukan liputan atas situasi tersebut untuk menarik perhatian pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Speaker Kampung ingin mendorong perubahan terhadap kondisi jalan tersebut sehingga dirasa perlu untuk menaikkannya ke dalam liputannya. Liputan tersebut berhasil menggugah pemerintah daerah dan masyarakat untuk melakukan tindakan. Melalui gotong royong masyarakat dan dukungan pemerintah, akhirnya kondisi jalan yang menembus Bilakembar berubah baik. Saat penulis melintas di sana, nampak kondisi sebagian jalan sudah ditutup aspal mulus. Eros mengatakan, bahwa liputan Speaker Kampung saat itu memang disengaja untuk menggugah pemerintah daerah untuk memperbaiki jalan tersebut.

Liputan yang mereka lakukan, bisa memunculkan resiko. Pada tahun 2014, radio komunitas Ninanta FM melakukan liputan terhadap pelaksanaan PNPM Mandiri, walau nampaknya tidak terlalu ditanggapi pengurus PNPM Mandiri, misalnya tidak hadir pada undangan talkshow di radio tersebut karena suatu hal. "Seperti acara *talk show* di radio kami sering mengundang pelaku PNPM, namun sering tidak menghadirinya" Jelas ingkong saat dikonfirmasi 26/3/2014 (Kampung Media, 29/3/2014). Namun untuk memenuhi akses terhadap informasi, relawan radio melakukan jemput bola, yaitu melalui wawancara langsung dengan pengurusnya.

Dalam rangka memberdayakan masyarakat untuk melakukan pengawasan dalam pembangunan, Speaker Kampung diajak oleh LSM Somasi (Solidaritas Masyarakat Untuk Transparansi) untuk menggalakkan jurnalisme warga. Menurut LSM Somasi, jurnalisme warga dapat menjadi garda depan dalam proses pengawasan pembangunan karena para relawannya merupakan warga desa yang bersangkutan, sehingga keterlibatan dalam persoalan yang ada akan berorientasi pada pemecahan masalah. Demikian juga dengan program kerja LSM Somasi terkait dengan pelayanan kesehatan masyarakat di tiga desa kecamatan Aikmel Lombok Timur. Pelayanan kesehatan sangat penting diperhatikan akuntabilitasnya karena hal ini merupakan kebutuhan dasar untuk kesejahteraan warga. Oleh karena itu, untuk menjamin pelayanan yang berkualitas, jurnalisme warga dapat bermanfaat untuk mendorong terciptanya pelayanan kesehatan yang baik oleh pemerintah (wawancara dengan Herul Anwar, 2017). Langkah-langkah yang mereka lakukan antara lain dengan pemberdayaan warga untuk lebih mengetahui hak-hak mereka untuk mendapat pelayanan kesehatan. Pemberdayaan warga tersebut antara lain berupa pembelajaran dalam organisasi kelompok warga. Saat ini kelompok warga yang jadi fokus adalah keluarga dan atau Anak Buruh Migran, Disabilitas dan Perempuan Miskin. Mereka akan menjadi kelompok belajar, tempat berbagi informasi dan akan menjadi mitra pemerintah desa agar tercipta akuntabilitas dalam pelayanan masyarakat (speakerkampung.net, 24/3/2017).

Mengapa LSM Somasi megajak kerjasama Speaker Kampung? Herul yang saat ini aktif di LSM Somasi mengikuti sejak awal dan ikut berjuang mendorong hadirnya jurnalisme warga melalui media komunitas. Ia melihat perjalanan Speaker Kampung dalam mempromosikan jurnalisme warga. Herul bersama dengan Eros dan Rasyid juga yang mengawali pendirian Speaker Kampung pada tahun 2012.

Keterlibatan Speaker Kampung di dalam kegiatan jurnalisme warga sejalan dengan keinginan mereka untuk lebih terlibat dalam proses-proses pembangunan di wilayahnya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mendukung inisiatif Kabupaten Lombok Timur untuk membentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). Berbagai KIM dari 60 desa di Lombok Timur bergabung di dalam Forum Kelompok Informasi Masyarakat (FORKIM). Dalam kaitan memaksimalkan peran warga dalam mengontrol proses pembangunan, Pada awal tahun 2017, Speaker Kampung bermitra dengan LSM Somasi akan memberdayakan masyarakat di tiga desa Kecamatan Aikmel terkait dengan isu program kesehatan. Speaker Kampung akan berfokus pada kerja-kerja jurnalisme warga untuk mendorong keberhasilan program kesehatan di kecamatan tersebut. Di sini mereka menunjukkan bahwa jurnalisme warga adalah bagian aktivitas warga untuk menjalankan hak dan kewajibannya, untuk ikut bertanggungjawab atas terciptanya perbaikan kondisi bersama. Dalam konteks ilmu sosial, aktivitas ini bisa dilihat melalui *citizenship*.

Kegiatan aktivis Speaker Kampung tidak melulu soal isu pembangunan fisik, namun juga menyentuh isu mental-spiritual. Ketika belakangan ini muncul persoalan negatif dari penyebaran informasi lewat media sosial seperti *hoax*, mereka segera merespon dengan pendekatan literasi yang mereka namakan Batur. Nama tersebut merupakan kependekan dari baca-tulis-tutur, yang sekaligus menunjukkan rangkaian kegiatan literasi. Pengertian *hoax* secara umum adalah informasi palsu yang sengaja dibuat dan disebar untuk mempengaruhi keyakinan khalayak. Boleh dikata ini adalah bentuk

tipuan atau manipulasi informasi yang canggih sehingga *hoax* dianggap sebagai informasi benar. *Hoax* ini bukan hasil dari interpretasi berbeda pada suatu peristiwa namun lebih merupakan suatu upaya yang dilakukan secara sengaja oleh pembuatnya untuk membelokkan kebenaran.

Pengaruh *hoax* dapat terjadi oleh karena rendahnya literasi media di masyarakat, yang dapat dilihat pada: minimnya usaha untuk melakukan verifikasi atas informasi yang diterima, motivasi untuk menjadi yang pertama dalam penyebaran informasi, serta tidak ada sumber informasi (seperti media arus utama) yang dianggap kredibel untuk mendapat verifikasi.

Literasi media sendiri bertujuan untuk memberdayakan masyarakat, di mana mereka diberdayakan untuk memiliki kompetensi memanfaatkan informasi. Bahkan mereka bisa terlibat dalam proses produksi informasi. Cita-cita media komunitas untuk menempatkan masyarakat sebagai pihak yang aktif, sejalan dengan ide dasar literasi media. Frank Biocca (1988) membedakan *audience* atau khalayak menjadi khalayak aktif dan pasif. Beberapa karakteristik yang dimiliki oleh khalayak aktif adalah: Pertama, khalayak aktif dianggap selektif ketika mengkonsumsi media yang akan digunakan. Kedua, utilitarianisme (*utilitarianism*), khalayak dianggap aktif apabila ketika mengkonsumsi suatu media selalu dilatarbelakangi kepentingan dan tujuan. Mereka mengkonsumsi media untuk memenuhi kepentingan serta kebutuhan yang mereka miliki. Karakteristik yang ketiga adalah intensionalitas (*intentionality*), yaitu menggunakan secara sengaja. Dalam konteks ini, khalayak harus bersikap aktif ketika mengkonsumsi suatu media tidak hanya 'sekarang' menonton saja. Artinya, saat menonton, mereka memiliki tujuan untuk memperoleh manfaat positif. Keempat, keikutsertaan (*involvement*), yaitu alasan yang selalu menyertai ketika mereka mengkonsumsi media. Kelima, khalayak aktif dianggap sebagai khalayak yang tidak mudah terpengaruh dan tidak mudah dibujuk oleh rayuan media (Littlejohn & Gray, 2001, p. 333).

Mengingat remaja merupakan pengguna media sosial, maka bagi aktivis Speaker Kampung, salah satu cara untuk menangkal *hoax* adalah dengan memperkuat pengetahuan remaja sehingga pengetahuan tersebut menjadi filter diri dari serbuan *hoax*. Pengetahuan antara lain diperoleh dengan banyak membaca. Namun agar menjadi pembaca aktif, mereka diminta untuk menulis hal-hal menarik dari bacaan tersebut, lalu membagikannya (lewat tuturan) kepada teman-temannya. Penulis melihat sendiri di SMP Islam Bilakembar, siswa-siswa mempraktekkan kegiatan BATUR ini. Dan bukan kebetulan jika salah satu guru sekolah tersebut, Rasyid Ridho, adalah termasuk pelopor Speaker Kampung.

Penulis menilai bahwa proses kegiatan BATUR berpotensi untuk membangun kesadaran peserta tentang "duniannya" atau lingkungan sekitarnya, karena ada proses penyerapan informasi, refleksi atas informasi dan sharing informasi. Artinya, informasi yang mereka dapatkan tidak mentah-mentah ditelan. Berdasar obrolan dengan Eros, salah satu pendiri Speaker Kampung, agar proses kegiatan Batur memberi inspirasi bagi yang lain, maka kegiatan tersebut disebarluaskan melalui Speaker TV, salah satu media dari Speaker Kampung.

4.2. Pendowo FM.

4.2.1. Profil Siaran Pendowo FM

Pendowo FM merupakan radio komunitas yang berbasis di Desa Balongbendo, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo. Paguyuban dipilih sebagai bentuk lembaga Pendowo FM, dengan demikian secara otomatis yang menjadi target utama adalah anggota paguyuban Pendowo. Sedangkan mayoritas anggota Pendowo ditilik dari status sosialnya 90% adalah kalangan menengah ke bawah. Sementara profesi yang dilakukan adalah 60% pedagang dan pengusaha home *industri*. Secara umum segmentasi yang dibidik oleh Pendowo FM adalah kalangan pelaku usaha kecil dan mikro yang perlu bantuan pengembangan untuk usaha. Bila dikelompokkan dalam strata pendidikan yang dibidik oleh Pendowo FM adalah kalangan berpendidikan menengah ke bawah. Sehingga dalam menyampaikan substansi isi siaran Pendowo FM selalu berpegang pada rumus menggunakan obat, penyesuaian dosis, dan ketepatan penyampaian.

Dengan segmentasi pendengar kalangan bawah dan berprofesi sebagai pelaku usaha kecil dan menengah, maka Pendowo FM memilih format siaran yang mengedepankan informasi dan pengetahuan yang bermanfaat melalui ceramah serta diskusi. Beberapa program unggulannya diantaranya Wawasan Kebangsaan bersama Emha Ainun Nadjib (Cak Nun) dari Pengajian Padhangmbulan, Bangbang Wetan dan Forum lain yang dipandu Cak Nun (*recorded*). Menurut Widodo Wawasan Kebangsaan diunggulkan karena ideologi non-kebangsaan saat ini mulai mempengaruhi warga Balongbendo, seperti

ideologi agama Islam kanan yang dibawa oleh Hizbut Tahrir Indonesia (Wawancara 18 Januari 2017). HTI masuk dan mempengaruhi warga lewat ruang-ruang pertemuan warga, pengajian, khotbah Jumatan di Masjid, dan sebagainya. Pendowo FM punya kewajiban untuk menyebarluaskan pandangan Islam yang berorientasi pada ranah kebangsaan, oleh karenanya dimunculkan ide program Wawasan Kebangsaan tersebut. Masih menurut Widodo, Pendowo FM dalam memformat siarannya memosisikan diri sebagai sarana pencerahan bagi masyarakat, mengupas berbagai permasalahan yang dapat memperkuat semangat kebangsaan dengan landasan nilai-nilai kemanusiaan dan sosial demi terangkatnya martabat bangsa.

4.2.2. Ruang Diskusi Pendowo FM

Sebagai bagian dari aktivitas Pendowo FM sebagai radio komunitas, ruang diskusi menjadi hal yang mutlak diperlukan. Ruang diskusi tersebut mewadahi para pendengar Pendowo FM yang ingin jumpa darat, serta berdiskusi mengenai hal-hal yang terjadi di sekitar khususnya di Desa Balongbendo dan Kecamatan Balongbendo. Widodo (wawancara 18 Januari 2017) mengungkapkan bahwa sejak tahun 2015 Pendowo FM menginisiasi pembukaan warung kopi di pelataran studio Pendowo FM. Warung kopi tersebut diberi nama De Brother Kafe yang menggabungkan konsep warung kopi dengan perpustakaan mini. Perpustakaan dihadirkan supaya pengunjung dapat menikmati kopi sekaligus membaca buku. Pengelolaan kafe tersebut dipercayakan kepada Kandar, orang muda yang sejak awal bergabung dengan Pendowo FM.

Produk yang disajikan oleh kafe ini terdiri dari 18 macam kopi nusantara, yang didatangkan langsung dari para petani kopi di daerah terutama di Sidoarjo dan sekitarnya. Hal ini menunjukkan bahwa Pendowo FM memiliki kepedulian untuk mengangkat potensi daerah, dalam hal ini kopi dan segala hasil bumi lainnya.

4.2.3. Pendowo Gugah Nusantara

Selain kafe De Brother, Pendowo FM juga menginisiasi pendirian lembaga sosial masyarakat Pendowo Gugah Nusantara. Menurut Widodo (wawancara 18 Januari 2017) Pendowo Gugah Nusantara merupakan lembaga sosial masyarakat yang secara khusus memberi perhatian kepada penerapan UU No. 6/2014 - selanjutnya disebut UU Desa – juga Sistem Informasi Desa (SID) baik desa-desa di kecamatan Balongbendo maupun desa lain yang berada di wilayah Jawa Timur. Dalam pelaksanaannya Pendowo Gugah Nusantara bekerja sama dengan aparat desa setempat, melatih dan memberikan pemahaman lebih lanjut kepada pimpinan dan staf mengenai UU Desa & SID.

Salah satu kegiatan yang pernah dilaksanakan Pendowo Gugah Nusantara ialah Pelatihan SID (Sistem Informasi Desa) dilaksanakan di Pendopo Kecamatan Mojowarno pada hari Selasa & Rabu 27-28 Oktober 2015. Sebagaimana ditulis di website resmi pemerintah Kabupaten Jombang⁴, pelatihan tersebut yang diikuti oleh Sekdes/Staf Desa se Kecamatan Mojowarno. Pendowo Gugah Nusantara hadir sebagai narasumber/pendamping juga LSM Combine dari Yogyakarta. Pelatihan SID ini berfungsi untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik yang berbasis kebutuhan di tingkat lokal/desa, termasuk adanya ketersediaan data yang bisa dimanfaatkan di tingkat desa, membantu proses perencanaan desa sebagai kekayaan data dalam menyusun dokumen perencanaan desa, serta untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas pembangunan di tingkat desa.

Pelatihan-pelatihan serupa sudah dilaksanakan juga oleh Pendowo Gugah Nusantara di beberapa desa di sekitar Sidoarjo seperti di Magetan, Malang, Pasuruan, dan sebagainya. Adapun beberapa poin dari UU Desa yang secara khusus diberi perhatian oleh Pendowo Gugah Nusantara ialah:

Dana miliaran rupiah akan masuk ke kas Desa. Sebagaimana diketahui bahwa desa akan mendapatkan kucuran dana dari pemerintah pusat melalui APBN lebih kurang 1 miliar per tahun. Hal ini sesuai dengan ketentuan di UU Desa pasal 72 ayat (1) mengenai Sumber Pendapatan Des. Dalam huruf 'd' disebutkan "Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota." Selanjutnya dalam ayat (4) pasal yang sama disebutkan, Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana

⁴ <http://www.jombangkab.go.id/index.php/web/entry/5698-pelatihan-sistem-informasi-desa-bagi-sekdesstaf-desa-se-kecamatan-mojowarno-tahun-2015.html>

perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Penghasilan kepala desa. Menurut pasal 66 UU Desa, kepala desa atau yang disebut lain (nagari) memperoleh gaji dan penghasilan tetap setiap bulan. Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa bersumber dari dana perimbangan dalam APBN yang diterima oleh kabupaten/kota ditetapkan oleh APBD. Selain penghasilan tetap yang dimaksud, kepala desa dan perangkat desa juga memperoleh jaminan kesehatan dan penerimaan lainnya yang sah. Berbeda dengan ketentuan undang-undang sebelumnya, dimana dinyatakan bahwa gaji kepala desa menjadi tanggung jawab desa yang bersangkutan, maka dalam ketentuan yang baru gaji desa dipikirkan oleh APBD kabupaten/kota setempat.

Kewenangan kepala desa. Dalam UU Desa dinyatakan tentang pembagian kewenangan tambahan dari pemerintah daerah yang merupakan kewenangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu adanya peluang desa untuk mengatur penerimaan yang merupakan pendapatan desa yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 72 UU Desa. Bagi Pendowo Gugah Nusantara, hal ini harus dikontrol supaya kepala desa dapat bertugas dengan benar, proporsional, serta jauh dari peluang penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

Masa jabatan kepala desa bertambah. Masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun dan dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut (pasal 39). Demikian juga dengan masa jabatan Badan Permusyawaratan Desa, mereka bisa menjabat paling banyak tiga kali masa jabatan, baik secara berturut turut maupun tidak berturut-turut. Berbeda dengan peraturan perundangan sebelumnya, masa jabatan kali ini ditambah 1x yang memberi kesempatan kepala desa menyelesaikan program kerja yang dirancangnya.

Penguatan fungsi Badan Permusyawaratan Desa. Menurut pasal 55 UU Desa yang baru, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi; membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Sistem Informasi Desa (SID). Berbagai aturan mengenai Sistem Informasi Desa (SID) tertuang dalam Pasal 86 yang merujuk kepada Sistem Informasi Desa dan Pembangunan Kawasan. Isi pasal tersebut sebagai berikut:

- g. Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- h. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
- i. Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.
- j. Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
- k. Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan.
- l. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk Desa.

Dari uraian di atas dapat dilihat hal yang tidak bisa ditinggalkan adalah pentingnya sumber daya manusia sebagai bagian dari Sistem Informasi Desa menunjukkan kewajiban pada pihak Kabupaten/Kota untuk memberikan pendampingan dan penguatan atas tata kelola informasi dan data pembangunan di tingkat desa. Aspek pendampingan inilah yang diisi oleh LSM Pendowo Gugah Nusantara, mengingat tidak banyak organisasi non-pemerintah yang menguasai substansi maupun teknis Sistem Informasi Desa (SID). Jadi Pendowo FM menjadi penggagas di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya dalam soal optimalisasi Sistem Informasi Desa (SID) untuk kemajuan pembangunan desa.

4.3.4. Pengawasan Pembangunan Pendowo FM – Dana Desa Balongbendo

Dana Desa (DD) adalah dana yang dikucurkan dari pemerintah pusat kepada desa agar digunakan untuk percepatan pembangunan desa dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya UU No. 6 Tahun 2014 desa mendapat kucuran anggaran yang berlimpah bila dibandingkan sebelum adanya undang-undang desa diberlakukan, disamping DD masih ada lagi

Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak (BHP), Bagi Hasil Retribusi (BHR) dan Bantuan Keuangan Daerah maupun Propinsi. Pendowo FM sebagaimana diungkapkan oleh Widodo (wawancara 18 Januari 2017) menyatakan bahwa banyaknya dana yang dikelola oleh pemerintah desa akhirnya mendorong pengelolaan yang akuntabilitas dan transparan. Tentunya ini memerlukan beberapa prasyarat utama yaitu kemauan pemerintah desa untuk mengelola keuangan desa dengan baik juga kapasitas aparatur pemerintah desa yang mempunyai kecakapan yang layak.

Dalam tatakelola desa kemauan setiap aparatur untuk mengelola keuangan dengan baik dan transparan menjadi syarat utama. Jika aparatur desa masih mempunyai kekurangan kemampuan bisa meng-*'upgrade'* diri dengan mengikuti berbagai pelatihan yang diadakan Pemerintah tingkat di atasnya atau Pelatihan aparatur desa yang dilakukan desa secara mandiri.

Ada persoalan yang hampir umum terjadi di setiap daerah, yaitu, dengan adanya keuangan desa yang besar menimbulkan kecurigaan berbagai pihak bahwa keuangan desa tidak digunakan sebagaimana mestinya. Sehingga, kecurigaan tersebut menjadi isu utama di kalangan masyarakat desa yang potensial menimbulkan gejolak sosial di desa.

Dengan banyaknya berita maupun iklan layanan masyarakat yang menyampaikan bahwa desa sudah memperoleh anggaran dana berbagai sumber membuat warga paham berapa anggaran yang dikelola desa. Tentunya dengan dana besar yang diterima desa sudah banyak hal yang dilakukan oleh Pemdes. Namun, kadang dengan perencanaan yang kurang matang pembangunan yang dilakukan oleh pemdes kurang dirasakan oleh masyarakat.

Semestinya pelibatan masyarakat dalam pembangunan desa menjadi sesuatu yang harus dilakukan oleh desa yang bisa disebut dengan istilah *'Pembangunan Partisipatif'*. Hal ini untuk mengeliminasi kecurigaan berbagai pihak bahwa tidak ada penyelewengan dan anggaran desa digunakan semestinya. Warga bisa bersama-sama Pemdes melakukan pengawasan. Dalam tatakelola yang baik bisa juga kerja Pemdes didukung aplikasi yang disediakan pemerintah maupun lembaga lain yang menyediakan aplikasi Non berbayar seperti SID dari Combine yogyakarta atau Siskeudes yang di release oleh BPKP.

5. KESIMPULAN

Dari penelitian yang dilakukan terhadap Speaker Kampung & Pendowo FM, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: bahwa media komunitas mendorong munculnya model pembangunan partisipatif, model pembangunan inilah yang bisa menanggulangi kecurigaan berbagai pihak komponen masyarakat yang ada di desa. Yang menjadi persoalan adalah apabila warga tidak merasakan perubahan yang signifikan akibat pembangunan desa. Hal ini akan menimbulkan pertanyaan, mengapa anggaran desa yang besar tersebut tidak bisa dirasakan hasilnya oleh warga. Bila isu ini dikelola oleh pihak yang berseberangan dengan Pemdes akan menjadi pemicu gejolak sosial di desa.

Solusi berbagai hal tersebut adalah tatakelola desa yang baik, transparan dan melibatkan partisipatif warga dalam melakukan pembangunan desa. Kemudian, jangan melupakan bahwa desa sebagai entitas pemerintahan yang masih memegang azas asal-usul dan adat istiadat yang sudah turun temurun dari generasi ke generasi. Desa jangan merubah dirinya menjadi kota, meskipun suasana sudah seperti kota, tetaplah berjalan sebagai desa dengan adat istiadat dan budayanya.

6. REFERENSI

- Biocca, F. (1988). *Opposing conceptions of the audience: the active and passive hemispheres of communication theory*. In J. A. Anderson (Ed.), *Communication Yearbook 11* (pp. 51-80). New York: Routledge.
- Creeber, Glen & Martin, Royston, 2009, *Digital Cultures: Understanding New Media*, London: McGraw-Hill Open University Press.
- Denzin, Norman K & Lincoln, Yvonna, 1994, *Handbook of Qualitative Research*, New York: Sage Publications.
- Goodspeed, R, 2015, 'Smart Cities: Moving Beyond Urban Cybernetics to Tackle Wicked Problems', *Revue Economique et Sociale*, vol. 8, no. 1, hh. 79-92.
- Hague, Barry N. & Brian D.Loader, 1999, *Digital Democracy: Discourse and The Decision Making in The Information Age*, New York: Routledge.

- Jahja, Ranggoaini, Haryana, Mariana, Dina, Rendra, Meldi, 2012, *Sistem Informasi Desa: Sistem Informasi Desa dan Data untuk Pembaruan Desa*, Yogyakarta: Combine Resources Institutions.
- Kampung Media, 29/3/2014. "Tantangan Media Komunitas Ditengah Program Pemerintah". Diakses pada tanggal 25 Maret 2017 dari <http://pelayanan-publik.kampung-media.com/2014/03/29/tantangan-media-komunitas-ditengah-program-pemerintah-1966>
- Lievrouw, Leah A. & Sonia Livingstone, 2006, *Handbook of New Media: Social Shaping and Social Consequences of ICTs*, London: Sage Publications.
- Lievrouw, Leah A., 2011, *Alternative and Activist New Media; Digital Media and Society Series*: Cambridge: Polity Press.
- Littlejohn, S. W., & Gray, R. (2001). *Theories of Human Communication* (7th ed.). Belmont: Wadsworth Publishing Company
- Nuswantoro, Ranggabumi, 2016, 'Keseimbangan Informasi', *Harian Bernas Jogja*, 20 Desember, h. 5.
- Pawito, 2007, 'Media Komunitas dan Media Literacy', *Jurnal Ilmu Komunikasi*, vol. 4, no. 2, hh. 167-177.
- Portal Desa Ketangga, tanpa tanggal. Diakses pada tanggal 20 Maret 2017 dari <http://ketanggalomboktimur.desa.kemendesa.go.id/pages/detail/58-penduduk-dan-tenaga-kerja>
- Radar Lombok, 28/7/2016. "Kasus Pernikahan Dini di Lotim Masih Tinggi." Diakses pada tanggal 29 Maret 2017 dari <http://www.radarlombok.co.id/kasus-pernikahan-dini-lotim-masih-tinggi.html#>
- Rennie, Ellie, 2006, *Community Media: A Global Introduction*, Maryland: Rowman & Littlefield Publishers. Inc.
- Rogers, Everett M., 1986, *Communication Technology: The New Media in Society*, New York: The Free Press.
- Speakerkampung.blogspot, 16/5/2016. "LPA Lotim Dukung Gerakan Anak Dalam Antisipasi Kejahatan". Diakses pada tanggal 1 Februari 2017 dari <http://speakerkampung.blogspot.co.id/2016/05/lpa-lotim-dukung-gerakan-anak-dalam.html#more>
- Speakerkampung.net, 24/3/2017. "Somasi NTB, Kuatkan Pengetahuan Warga Untuk Mendapatkan Pelayanan." Diakses pada tanggal 2 April 2017 dari <http://speakerkampung.net/somasi-ntb-kuatkan-pengetahuan-warga-mendapatkan-pelayanan/>
- West, R., & Turner, L. H. (2009). *Pengantar Teori Komunikasi: Analisis dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Winston, David, 2003, *Digital Democracy and the New Age of Reason dalam Democracy and New Media*, Henry Jenkins dan David Thorburn (Eds), Cambridge: The MIT Press.